

12 APRIL 2010

WAWANCARA DENGAN YAHYA SACAWIRIA DI GEDUNG DPR RI LT 22,
JAM 12.30 TENTANG STRATEGI PARTAI

MH: Jelaskan strategi partai atau tentang kebijakan Partai Demokrat baik internal maupun eksternal?

YS: Saya sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) dan saya juga wasekjen DPP Partai Demokrat, bapilu partai Demokrat strukturnya itu adalah bagian dari pengurus harian, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan internal juga, bagaimana melakukan pembangunan partai, saya juga dilibatkan, contoh yang sederhana saya juga ketua korwil, itu *khan* juga bagian dari internal, sehingga proses-proses dan mekanisme untuk melakukan penataan organisasi ke dalam baik itu musda, muscab, kita sebagai ketua korwil juga ikut dilibatkan termasuk masalah-masalah pilkada sehingga kita menjadi *include* kedalam dan keluar. Kenapa saya katakan itu, karena kalau kita hanya *outlooking* tanpa melihat ke dalam, maka itu sangat tidak cantik dari segi strategi pemenangan pemilu, kenapa? Karena nanti saya sebagai pelaksana di lapangan tidak faham tentang kekuatan yang dimiliki oleh dalam, maka ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Karena nanti target kita disini, kekuatan yang harus kita siapkan, kalau kita tidak masuk ke dalamnya, *dag dug dag dug* ini sangat merugikan, karena kita juga harus tahu kekuatan kita.

MH: Untuk mengukur kekuatan partai dalam mengeluarkan kebijakan eksternal itu melalui apa?

YS: *Pertama*, kita melihat sejauh mana struktur organisasi, kita bicara mengenai struktur organisasi dulu, karena inilah yang sudah menjadi terbenahi semua, dari tingkat pusat sampai tingkatan yang paling bawah, tingkatan yang paling bawah itu adalah tingkat PAC, ranting di tingkat kecamatan dan tingkat anak ranting, karena itu menjadi motor penggerak kita di lapangan. yang *kedua* adalah sampai sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing kader yang menjadi bagian, contohnya kaitannya dengan kualitas, *nah* ini yang menjadi salah satu parameter yang kita munculkan, bagaimana pada saat ketika mendidik mereka itu yang *notabene* calon-calon anggota legislative, calon-calon yang mau bertempur dilapangan, ini harus kita ukur kekuatannya dari aspek kemampuan lapangan, contohnya sejauhmana kemampuannya dalam menganalisa lapangan, kemampuan dia untuk menjadi pelaksana di lapangan, ini bisa terbaca pada saat mereka ditatar karena itu kita menggunakan sistem pemusatan, dengan kita tahu ukurannya itu, disamping kita punya kekuatan-kekuatan lain terutama adalah pasukan tetangga, yang dimaksud pasukan tetangga itu adalah organisasi relawan atau yang siap membantu kita.

Partai Demokrat memberikan target kepada masing-masing daerah Pemilihan (DAPIL) dalam rangka memberikan parameter yang jelas dan kuat, memberikan target tersebut tidak omong kosong tetapi berdasarkan analisa dan survey.

MH: Wilayahnya mana itu yang bisa dijadikan target besar?

YS: Jawa Barat lalu Jawa Timur kemudian Medan kemudian Aceh itu target yang cukup signifikan. Bali bukan sebagai target tapi hanya sebagai gengsi lebih menonjol, kemudian dua wilayah yang punya nilai politistik yaitu Papua dengan Nangroe Aceh Darussalam dan ternyata hasil yang kita dapatkan mereka rata-rata melewati target yang kita tentukan, walaupun nun jauh disana tetapi karena kita selalu komunikasi dan sudah tahu kualitasnya, contohnya kita lihat pertama kali didik, kita lihat bagaimana loyalitasnya, bagaimana rasa espedekor diantara mereka, karena saya 24 jam menemui mereka, jadi saya tahu. Misalnya targetnya harus sekian, saya lebih banyak hanya memberikan motivasi-motivasi dan ternyata banyak yang memenuhi target yang ditentukan.

MH: Bagaimana dengan kebijakan eksternal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat?

YS: Saya katakan bahwa Ketua BAPILU, tidak hanya sebatas urusan internal saja tetapi bicara eksternal juga. Salah satu wujud dari partisipasi yang harus di berikan masyarakat adalah masyarakat itu perlunya apa sih? Jadi kita tidak melakukan sesuatu yang *muluk-muluk*. Yang sederhana, karena sesuai dengan teori Maslow, hajat hidup orang banyak masyarakat itu, *basic need*-nya, *nah* itu yg kita jalankan sasaran, mengapa? Terus terang 80% masyarakat itu ada di daerah pedesaan, maka yang kita sentuh adalah hubungan emosional. Dengan perilaku atau sifat anggota partai Demokrat dalam melakukan pendekatan yang lebih bersifat kemanusiaan. Pemain Partai Demokrat yang di lapangan pada tingkatan caleg DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota itu lebih banyak orientasinya kepada kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar maka bagaimana caranya untuk mempengaruhi masyarakat tersebut. dari kebutuhan masyarakat itu maka yang dijual oleh Partai Demokrat adalah pemerintahan SBY.

MH: Pola hubungan SBY dan Partai Demokrat dalam membuat kebijakan?

YS: apa yang dituangkan pemerintah SBY mulai segala macam program-program, *khan* kemudian diturunkan ke DPD dan DPC, buku-buku dan panduan diturunkan, *jadi* ngomongnya ke bawah itu *yah* seolah-olah corongnya pemerintah, corongnya SBY, corongnya Demokrat

MH: Apakah kebijakan eksternal itu dari DPP dulu baru ke SBY berdasarkan hasil diskusi?

YS: Hal-hal tersebut banyak yang bersifat langsung dari SBY, itu bagian dari program pemerintah “**programnya SBY**”, pemerintah SBY kemudian langsung

disambut dan diterjemahkan oleh kita, itulah yang didagangkan di lapangan, contohnya program KUR, program BLT itu kan program pemerintah, itulah dagangan kita dan rakyat percaya dengan dagangan kita, karena apa hubungan ini ada tapi mungkin beda dengan Golkar yang *ngedagangin* program tersebut, *gak* laku. Jadi saya katakan bahwa saya jualan enak, kenapa? jualan barang bagus bukan jualan barang jelek, sekarang menteri-menteri, semua menteri bahkan dari partai kita sebut koalisi ada *khan* tapi dia jualannya tidak laku

MH: Masyarakat memandang bahwa kebijakan pemerintahan SBY yang sukses adalah kebijakan SBY bukan kebijakan menteri-menteri?

YS: Kalau kita jualan partai itu belum tentu laku, tapi kami jualan SBY juga. Itu salah satu strategi kita, maka menghadapi Pemilu 2014, itu tidak berubah polanya, kalau kita rubah, agak *ngeri* juga gitu *lho*.

MH: Jadi kebijakan itu relative tidak dibuat oleh DPP Partai Demokrat?

YS: tidak,

MH: Jadi DPP Partai Demokrat itu hanya mentransfer hasil dari apa yang dibuat oleh kebijakan pemerintahan?

YS: Karena sekarang ini jualannya lebih bagus, kalau DPP Partai Demokrat yang buat jualan pasti tidak sebagus yang kini, pola hubungannya begini, contohnya dalam setiap pertemuan, dua minggu sekali, kumpulnya di Cikeas, SBY menjelaskan program-programnya, *nah* semua mencerna semua program pemerintah yang disampaikan SBY, kemudian diberikan buku-buku, *nah* inilah yang dijual karena kebetulan SBY juga selaku ketua dewan Pembina jadi *include* aja, kalau itu program partai, yah *fifty-fifty* aja. Tetapi terus terang kita akui lebih banyak adopsi atau serap turun kebawah, kedepan memang itu menjadi satu tantangan yang cukup berat tetapi kalau selama 5 tahun ini program yang dilakukan cukup bagus, ini juga menjadi kredit point bagi Partai Demokrat menjual dagangan itu ke depan.

MH: Kenapa strategi kampanyenya, KUR, BLT, PNPM itu *khan* hasil kerja pemerintahan periode kemaren, maksud saya, kebijakan ini *khan* kalau hanya mengandalkan anggota dewan atau DPP atau struktur DPP sampai PAC anak ranting, mobilitas ini belum tentu terjalin, ada kah strategi lain yg dibuat selama proses kampanye?

YS: jadi begini, satu, *air campaign* itu yah sudah jelas, kita melaksanakan perang darat kita punya 3 komponen yang selalu, satu pemerintah (SBY) kemudian disitu juga ada struktur partainya terus kemudian ada calegnya, jadi tiga komponen itu menyatu, sedangkan relawan-relawan masuk dalam komponen tersebut. Itulah tiga komponen tersebut yang selalu mensosialisasikan kemana-mana. Jadi, antara konsep antara pemikiran mengenai *air campaign* ini yang disebarkan melalui baliho, foster dan lain-lain itu dengan implementasi atau

operasional yang dilakukan oleh 3 kekuatan itu. Struktur kemudian caleg, SBY dan relawan di dalamnya, itu satu sejalan. Contoh sederhana, *air campaign* mengatakan lanjutkan, kita dibawah implementasi, apa mau dilanjutkan apa enggak, kalau lanjutkan berarti Partai Demokrat harus menang. Logikanya, kalau bapak senang dengan SBY, maka bapak ibu harus milih Partai Demokrat, knp? Karena nanti yang akan mencalonkan SBY untuk jadi presiden adalah partai Demokrat sebagai bagian integral dari jiwanya SBY.

MH: Itu apakah ada peranan militernya dalam Perang Darat yang cukup signifikan?

YS: Jadi begini karena saya bekas pimpinan militer, saya sangat hormat kepada struktur militer, karena dulu saya termasuk SBY adalah orang yang minta militer itu netral tahun 1999, tetapi disini orang melihat, contohnya struktur militer yang ada disana itu ada bekas tentara, hubungan emosional tidak bisa dipungkiri walaupun saya tidak memerintah.

MH: Berarti tataran elit tidak menggerakkan yah?

YS: Tidak menggerakkan ke tentara-tentara sedikitpun, saya *khan* pengendali operasinya, tetapi kalau purnawirawan betul bergerak karena sudah jadi rakyat biasa, ada satu grup purnawirawan, bukan hanya saya sendiri tetapi dari partai lain juga banyak purnawirawan-purnawirawan, itu psikologis tetap.

MH: Tapi *khan* ada faksi-faksi bisa dijelaskan, faksi SBY, faksi Wiranto dan faksi Prabowo?

YS: *Yah* mungkin karena dagangan kita lebih bagus, jadi lebih laku, mereka juga *khan* udah sama-sama tahu, SBY seperti apa, Wiranto seperti apa, Prabowo seperti apa, berbeda dengan yang diluar lingkaran tidak tahu A-Z nya Prabowo, mereka sudah bisa nilai *kok*, apalagi yang dulunya sering kumpul bergaul aktif, bedanya satu dua *lettingan*, *khan* dua-duanya sudah sama-sama tahu, saya mengerti siapa Wiranto, pernah kumpul bareng, plus minusnya saya juga tahu, banyak dilingkungan TNI, ruang itu jadi lebih sempit, knp? Karena saling mengetahui, saya diketahui oleh mereka, karakternya oleh adek-adek saya yang lebih junior, knp? Karena begitu cepatnya terjadi suatu perputaran rotasi jabatan

MH: Dalam mengambil kebijakan partai itu, khususnya masalah yang sifatnya internal, apakah Badan Pemenangan Pemilu sudah melakukan survey atau udah teken kontrak dengan Lembaga Survey tertentu, terus kemudian mengambil kebijakan A seiring dengan *checking* kebijakan yang dilakukan oleh lembaga survey itu.

YS: Jadi survey itu sesuatu yang cukup positif sehingga kita bisa tahu dinamika yang ada di lapangan dan langkah apa yang harus kita laksanakan misalnya nyata penurunan suara di wilayah, dan apa yang harus lakukan.

MH: Survey itu berapa bulan sekali dalam melihat opini publik?

YS: rata-rata sebulan sekali, kita mulai intensif itu dari 2008 awal, itu intensif-nya

MH: LSI Saiful Mujani?

YS: ya, pembandingan survey ada tapi yang lebih dominan Saiful Mujani, LSI diberikan keleluasaan untuk menjelaskan dan menyampaikan yang benar maupun yang tidak benar. Contoh pada Agustus 2008, kita melakukan *briefing*, ketemu dengan Ketua Dewan Pembina, itu dijelaskan bahwa hasil *polling* kita hanya 8,7 dan itu *clear* dijelaskan. partai Demokrat itu juga belum begitu kuat, jadi kita menyampaikan sesuatu yang relative lebih adil tapi itu merupakan suatu motivasi untuk dorong, walaupun awalnya saya ragu-ragu, ini bisa *gak yah?*

MH: Bagaimana dengan targetnya partai 15 %?

YS: Dari awal mengatakan 15 persen, *yah* dulu juga bahwa hasil dari pencalonan itu 15 persen, itu patokannya tapi kenyataannya menjadi 20%, mau suka ataupun tidak harus dinaikan untuk meningkatkan motivasi, jadi waktu itu kita berdasarkan *pooling* sampai Januari, Maret, kita yakin bahwa 20 ini sudah terlewat.

TRANSKRIP TESIS

29 APRIL 2010

WAWANCARA DENGAN ANAS URBANINGRUM DI GEDUNG DPR RI

MH: masalah aturan partai dalam mengambil kebijakan itu seperti apa?

AU: kebijakan partai garis besarnya diputuskan oleh rapat pengurus harian, hal-hal yang sangat strategis dikonsultasikan dan disetujui oleh ketua dewan Pembina

MH: Apakah ketua umum mempunyai hak veto?

AU: tidak punya, semua berdasarkan AD/ART Partai Demokrat

MH: Posisi ketua Dewan Pembina mempunyai posisi yang kuat untuk mempengaruhi DPP Partai Demokrat

AU: Ketua Dewan Pembina mempunyai otoritas yang kuat, kebetulan otoritas itu bertemu dengan figure pak SBY yang *central* yang dihormati dan diikuti arahnya oleh DPP dan kader-kader

MH: Masalah kebijakan internal dari mulai periode awal 2005-2010, dijelaskan periode konsolidasi dalam membangun partai?

AU: pembangunan jaringan *khan* dilakukan dan dilanjutkan pasca kongres Bali termasuk rekrutmen kader-kader baru, memang harus dilakukan kebijakan partai tersebut, merekrut kader-kader baru terutama di propinsi dan kabupaten kota, itu istilahnya adalah strategi rekrutmen terbuka

MH: Masalah pemilu legislative itu ada keputusan dari MK menggunakan suara terbanyak, pertanyaan saya nomor urut satu itu syarat untuk menjadi nomor satu apa?

AU: Kriteria-kriterianya menjadi patokan, kemampuan, kapabilitas, integritas moral, kriteria posisi di dalam struktur partai dan kontribusi ke partai. `Finalisasinya dikonsultasikan ke Ketua Dewan Pembina, jadi kalau ada yang *nyogok* dalam finalisasi oleh Ketua Dewan Pembina akan digeser, *yah* tidak ada artinya *khan*, saya kira itu non-faktor *lha*.

MH: Mengenai sogok-menyogok, Dewan Pembina tidak semuanya tahu semua caleg dari Partai Demokrat, bisa saja lolos tanpa sepengetahuan Dewan Pembina?

AU: semua calon legislative dari nomor satu sampai lima beliau tahu semua

MH: Bagaimana caranya membuat kebijakan eksternal, ada anggapan bahwa DPP tidak membuat kebijakan karena yang lebih dominan DPP hanya proses mengawal kebijakan bukan membuat kebijakan

AU: Posisi partai Demokrat adalah posisi mendukung pemerintah, pendukung pemerintah tugasnya mengawal kebijakan pemerintah. *kedua*, tentu memberikan masukan-masukan, pertimbangan pada pemerintah, dua itu saja tugasnya sebagai partai pemerintah

MH: Apakah ada ide orisinal, kebijakan yang diberikan kepada pemerintah dalam arti ke dewan Pembina untuk dijadikan sebuah kebijakan pemerintah?

AU: masukan-masukan rutin di bidang politik, ekonomi, hukum, kemudian diramu. Ketika menjadi suatu kebijakan sudah jadi ramuan, pikiran banyak orang termasuk para pembantu presiden di pemerintahan

MH: jadi lebih ke mengawas daripada posisi membuat kebijakan

AU: kalau produsen kebijakan itu pemerintah, partai *khan* tidak membuat kebijakan



APRIL 2010

WAWANCARA DENGAN JOHNY ALLEN MARBUN (JAM) sebagai (Ketua Organisasi Keanggotaan Kaderisasi DPP PARTAI DEMOKRAT) DI GEDUNG DPR RI LT 9 JAM 13.00 TENTANG STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM MEMENANGKAN PEMILU 2009

MH: Apakah kebijakan internal dalam memenangkan pemilu 2009?

JAM: Kita tahu kongres di Bali itu *khan* baru pertama, pertama kita tahu bahwa secara kelembagaan partai Demokrat sebelum kongres itu, hanya memenuhi persyaratan verifikasi terakhir KPU, kalau ga salah tujuh puluh lima, lima puluh. Tentunya kongres pertama itu, kita melakukan kebijakan pembenahan kelembagaan pada waktu itu sampai pada tingkat kecamatan, dari tingkat kebijakan sumber daya manusia, kebijakan sumber daya manusia pada waktu itu saya sebagai ketua OKK, maka saya mengatakan kita rekrutmen 5 tahun, rekrutmen *leadership* bukan rekrutmen umum. kalau rekrutmen *leadership* Partai Demokrat dari mulai kecamatan sampai tingkat propinsi.

MH: kebijakan itu ga diarahkan lebih bawah lagi, maksudnya ranting?

JAM: tentu, kita harus terhubung, bertahap itupun ga mudah selama 5 tahun, bahwa ranting iya, tapi fokus kebijakan ini dulu, kalau ranting itu ada beberapa kabupaten kota, artinya supaya dapat informasi yang *pas*. Sebagai ketua OKK, apa yang disebutkan rekrutmen disitu adalah rekrutmen kepada tingkat pimpinan-pimpinan partai dari tingkat DPD sampai tingkat kecamatan, dimana dalam konstelasi itu proses kaderisasi belum ada, karena baru kongres pertama sehingga disitulah saya katakan siapa saja boleh masuk, sehingga disitulah waktu dikongres pertama, dipilih *khan* hanya ketua umum, Musda pertama, muscab pertama, memilih ketua dan sekretaris, kenapa memilih ketua dan sekretaris, pemikiran saya adalah mengkombinasikan rekrutmen yang baru dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pengusaha untuk meng-*combine* yang lama, katakan kalau dulu ketuanya sebagai ketua, saya kombinasikan jadi sekretaris kalau misalnya ada orang yang bupati atau wakil bupati, itulah yang saya lakukan dari 2005-2007 jadi perkuatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk 5 tahun, nah memang ada beberapa ranting

MH: 2 tahun cukup untuk melakukan konsolidasi tersebut?

JAM: 2005-2007 itu yang saya lakukan, terbentuklah semua dengan pola itu, sehingga pada kongres kedua ga lagi tentunya, sudah kaderisasi *khan* ga boleh lagi orang luar tiba-tiba yang masuk, kalau kemaren *tuh* semuanya memungkinkan. Makanya ada beberapa bupati, beberapa pengusaha, ada sekretarisnya pasti orang lama, ga ada dua-duanya menjadi orang baru, tentunya pembenahan

kelembagaan itu sampai kepada tahap infrastruktur partai, itu yang menjadi kebijakan kita yang internal, kebijakan internal berikutnya adalah dampak eksternal memenangkan pilkada, karena pilkada juga merupakan bagian dari satu kekuatan proses politik dalam pembesaran partai, sehingga tentunya katakanlah partai baru, kita lebih mengarah kepada dua hal targetnya menang, kalau misalnya kita karena rekrutmen tadi sudah pasti kita lawan, bupati, wakil bupati pasti kita lawan.

MH: Dalam arti memenangkan maupun menang, karena *khan* belum tentu kader secara keseluruhan dari Partai Demokrat

JAM: Itu harus, dia udah bupati *incumbent* terus ia wakil bupati *incumbent*, disitu tentunya juga harus memiliki satu hal yang sangat butuh, apa itu? Menang kalah itu *khan* mulus, baru tahap ketiga katakanlah tentunya adalah berdasarkan *pooling*, dengan Universitas Indonesia kita sering melakukan *pooling*.

MH: Tapi sebelumnya sudah melaksanakan *pooling*

JAM: Sudah *donk*, kecuali ketua DPC itu bupati ga mungkin kita *pooling*, untuk apa kita *pooling*, buang-buang waktu aja, pasti kita bawa. Kalau itu misalnya pemimpin partai Demokrat yang bupati atau wakil bupati, *yah* kita lakukan *pooling*

MH: tapi semuanya itu pasti diadakan *pooling*?

JAM: pasti, kita lakukan. terus terang saja memang kita banyak multi partai yang pada khususnya putaran pertama pilkada, kita sama-sama berkoalisi. Hanya ada satu yang sendiri, misalnya Siantar. kalau sekarang *khan* karena khususnya putaran kedua ini, sudah banyak yang sendiri-sendiri.

MH: Tapi hampir mayoritas untuk pilkada, Partai Demokrat ga signifikan dalam memenangkan?

JAM: dalam pilkada putaran pertama ya, pada saat itu tentunya masih didominasi kepala daerah kuning dan merah, tapi kita ga juga seperti di Riau misalnya kabupaten Siak tapi istilahnya *relative* misalnya kita dengan PDI dan GOLKAR itu bersama-sama, karena ga ada baik PDI maupun Golkar hampir jarang juga sendiri-sendiri, cuma pemberitaan pada waktu itu *khan* Partai Demokratnya ga *nongol*, padahal bersama-sama juga sebetulnya, tapi yang jadi bagian menonjol kader Partai Demokrat, ga...! karena baru rekrutmen *khan* hanya beberapa yang memenuhi.

MH: Pola kaderisasi yang dibangun DPP Partai Demokrat, seingat saya *khan* ada PKKPD?

JAM: jadi saya bilang tadi, pada tahap pertama kongres pertama, barulah setelah itu barulah berjalan proses kaderisasi *khan*, kaderisasi ga hanya kaderisasi yang

dipuncak, lokal juga sudah ada, seperti Sulawesi Selatan sudah ada sebelumnya, yang dipuncak *khan* lebih nasional jadi lebih terekspos, di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara bahkan di Sumatera Selatan itu juga sudah ada cuma ga terekspos aja, tinggal barangkali kualitasnya yang harus dinaikkan, itu kebijakan konteks kaderisasi maupun pilkada, itu yang menjadi titik point dari kebijakan internal dan eksternal, itu sudah dua point *khan*, partai itu *khan* fungsinya memenangkan legislatif dan eksekutif, itu sasarannya *khan*, nah baru bagaimana kepedulian Partai Demokrat terhadap masyarakat, yaitu tentunya melalui Partai sebagaimana kegiatan-kegiatan yang disebut rutinitas, apa yang disebut rutinitas dalam masyarakat itu adalah pertama dulu saya arahkan bagaimana para kader pada setiap event-event kecil maupun event besar ikut memberikan perhatian, contoh katakanlah hari-hari besar nasional, hari-hari lokal, ulang tahun bahkan juga hari-hari kelompok masyarakat dalam keagamaan, ucapan selamat juga belasungkawa dalam proses tertentu.

MH: Apakah itu kebijakan nasional?

JAM: iya, itu untuk ikut mengucapkan, katakanlah mungkin karena keterbatasan waktu, masa iya ga ke buat spanduk, kembang misalnya atau orang pesta, saya sendiri melakukan itu, itu kita dilakukan khususnya ke anggota-anggota fraksi yang kita harapkan bisa mumpuni dalam segi *marketing*. Lalu tentunya ga ada sifatnya insidental atau *emergency*, katakanlah bencana, kita masuk kedalamnya, itu yang kita lakukan. Hanya memang bedanya, terus terang saja pada posisi kemaren sebelum pemilihan legislatif maupun eksekutif, Partai Demokrat itu kurang terekspos, yang terekspos *khan* karena dekat legislatif dan eksekutif nasional, sebetulnya kegiatan Partai Demokrat itu banyak cuma ga terekspos media karena media *khan* siapa pemilik modal, itu katakanlah setiap rakerda, rapat daerah, rakercab itu selalu saya

MH: Membangun hubungan DPP dengan DPD, DPC itu bagaimana bang? *Khan* di setiap konfercab maupun itu *khan* pasti ribut bang, bagaimana membangun itu?

JAM: terus terang saja MUSDA di 33 propinsi saya yang pimpin pasti kondusif, ga ada yang *anarkhis*, bahwa ada riak-riak, tapi ga sampai anarkis

MH: Dalam setiap MUSDA 33 propinsi, semuanya orang dalam atau orang luar?

JAM: Itu rekrutmen tadi, relative ga semua dari luar, seperti misalnya Medan, orang dalam *khan*, katakanlah Jawa Timur dari luar wakil gubernur, Jawa Barat misalnya Sulawesi Selatan orang dalam, Sumsel orang dalam, Papua bekas orang dalam, Bengkulu orang luar, *yah* lebih banyak orang luarnya, tapi orang dalamnya kita kombinasi lebih banyak menjadi sekretaris.

MH: untuk cabang bang?

JAM: Relatif pemilihan cabang pun ga ada, begitu banyak riak karena mereka ga banyak menginginkan, kalau kita berhitung orang luar itu pasti secara indicator-indikator *personalitynya* lebih terukur dan mereka juga ga lebih *well* ketokohnya untuk meng-*combine* orang dalam sendiri, seperti halnya Kaltim, DPD-DPD lamanya sekretaris, yah kayak gitu-gitu, itulah kebijakan yang kita ambil pada zaman itu

MH: Dalam membangun Partai Demokrat pada tahun 2007 ke 2009 itu apa bang?

JAM: 2007-2009 sudah ga banyak konstelasi kelembagaan. Tapi sudah menjadi keperdulian masyarakat yang melakukan katakanlah rakerda, rakercab untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut konteks jangka pendek dalam konteks tahunan partai Partai Demokrat terhadap masyarakat

MH: DPP menyelenggarakan Rakernas berapa kali itu bang?

JAM: DPP itu untuk rapat kerja nasional terus terang saja pertama kali itu kita lakukan di Jakarta kalau ga salah dua kali, kalau rapimnas beda, kalau rakornas dua kali, kalau ga salah.

MH: apa bedanya bang rakernas dan rakornas

JAM: kalau rakernas itu *khan* rapat kerja nasional, dalam kaitannya program nasional untuk bisa di implementasikan ke daerah dan program daerah bisa di implementasikan cabang, kalau rapimnas itu rapat pimpinan nasional mendekati sesuatu isu-isu nasional yang akan kita sepakati untuk menentukan sikap, kayak kemaren misalnya rapimnas itu untuk katakanlah menjadi presiden atau ada sikap-sikap yang apa gitu. Kalau rakornas itu rapat koordinasi nasional, rapat untuk mengkoordinasikan isu-isu nasional tapi ga mengambil keputusan hanya sebatas koordinasi, hanya untuk pencerahan-pencerahan menyikapi hal-hal yang menonjol kayak kemaren misalnya bagaimana SBY menyikapi perkembangan tapi ga mengambil keputusan disitu tapi kalau rapimnas mengambil keputusan.

MH: tapi itu semuanya hanya satu kali dua kali aja ya bang ?

JAM: kalau rapimnas itu *khan* pertama kali sebelum 2005 adalah penetapan dalam konteks SBY sebagai presiden, terus juga saya kira dalam konteks rakernas juga rakornas lebih banyak, SBY mengkoordinasikan sikap anggota fraksi Partai Demokrat pusat, propinsi dan daerah untuk memberikan pencerahan koordinasi.

MH: kalau dilihat secara keseluruhan bicara masalah kebijakan internal itu *relative* hampir sama dengan partai lain bang, ada ga yang membedakan Partai Demokrat dengan yang lain?

JAM: saya kira pertama ada rekrutmen selama lima tahun berbeda dengan partai lain, kalau partai lain sudah duluan terbentuk, itu yang pertama bahwa kita rekrutmen selama 5 tahun untuk koordinasi dan mengkombinasikan, itu kebijakan nasional dan itu juga kita tuangkan dalam juklak dan juknis dalam proses musda dan muscab itu sendiri. Yang kedua kaderisasi yang kita lakukan di puncak.

MH: Pola sistem pelatihannya bagaimana bang?

JAM: itu *trainer by trainer* atau melatih pelatih, tingkat propinsi, tingkat kabupaten kota, kalau bisa sampai tingkat kecamatan dan ranting

MH: pelatihan sistem militer atau bukan bang?

JAM: saya ga bilang system militer tapi bahwa ada yang kita adopsi dalam konteks disiplin. Saya ga mengatakan itu sistem militer, itu boleh dikatakan perpaduan baik disiplin maupun mentalitas artinya apa yang dilakukan disitu adalah meningkatkan hubungan emosional satu sama lain, bagaimana meningkatkan satu sama lain supaya jadi komunikatif, supaya menjadi *friendly*, supaya menjadi kenal mengenal dalam satu rumah yang besar, itu *pointnya* outadior itu. Supaya kalau ada perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, tingkat emosionalnya dapat terpelihara, bisa diselesaikan dengan kondusif, itu sebetulnya *pointers*-nya. karena disitu yang ditekankan adalah kebersamaan, kejiwaan, psikologis. Sebelumnya sudah ada pengetahuan-pengetahuan umum tentang politik, tentang persoalan ketatanegaraan dan sebagainya.

MH: terus menjelang pencalonan legislative, nomor urut itu bagaimana bang?

JAM: *nah*, tentunya memang persoalan penyusunan nomor urut itu ada indikatornya *khan*, indicator yang pertama tentunya melihat *personality* daripada keaktifan atau kepengurusan, katakanlah DPD, daripada DPD itu *khan* udah ga asing lagi, *nah* baru ditempatkan posisi latar belakang yang bisa membahas, baru yang dilihat keperdulian atau keaktifan, tanggung jawab selama dia menjadi pengurus. *Point* yang pertama *khan* kepengurusan tapi dalam kepengurusan ini *khan*, ada ukurannya, sejauh mana tanggung jawabnya selama menjadi pengurus, ga bisa dibilang satu dua *lha*, karena itu *khan* komprehensif. Kemudian latar belakang daerah, saya dulu *khan* Papua, kenapa saya ga ambil Sumatera Utara misalnya, karena ada perubahan Undang-undang waktu itu *khan* 30%, bagi saya pun 30% bukan hal yang mudah, itulah yang melatarbelakangi saya mengambil sumut 2, kenapa ga sumut 1, toh sama-sama Sumut. Tentunya *khan* karena pertimbangan, saya *khan* kader daerah, baru tentunya ada simpatisan, ga hanya untuk kuota 100% dari 560 *khan* khususnya untuk kaum gender, kaum perempuan, keseimbangan laki-laki dan perempuan, itu juga simpatisan-simpatisan Demokrat banyak yang dimasukkan.

MH: Apakah ada indikasi masalah nomor urut dalam pencalegan itu setoran?

JAM: saya kira ga ada, walaupun ada itu lebih dominan kepada isu, saya mengatakankan isu karena saya sendiri ga melihat itu, isu itu saya ga bisa mengatakan benar, namanya juga isu

MH: Kalau seandainya secara keseluruhan telah memenuhi kriteria, tapi ternyata mendapatkan nomor 2, nomor 3, nomor 4?

JAM: *khan* nomor 1 *khan* cuma satu, saya misalnya nomor satu, sama-sama pengurus DPP terus ada nomor 3, *khan* ga mungkin saya putar-putar, demikian juga di tempat lain, kalau satu ga Satu mungkin bisa, he..

MH: Terus bagaimana sistem merengkingnya Bang?

JAM: itu tadi pertama *khan* dia pengurus, yang kedua sejauh mana tanggung jawabnya sebagai pengurus, berbuat apa, *khan* ada juga pengurus yang hanya nama, datang sebentar kemudian pergi, baru berikutnya adalah latar belakang daerah pemilihan, tentunya persyaratan umum, seperti pendidikan dan lain sebagainya.

MH: Siapa yang memimpin panitia pencalonan Legislatif?

JAM: Ja'far, beliau ketua bidang pertanian. Saya sebagai wakil ketua dan Wayan sekretarisnya. TIM ini hanya dalam proses pencalegan tapi *khan* semuanya sudah kita kembalikan kepada ketua umum dan sekretaris jenderal

MH: gak ada masalah dari proses nomor urut itu bang?

JAM: kalau dikatakan ga ada masalah, mana ada hidup ini yang 100% yang ga ada masalah.

MH: maksud saya ga menimbulkan gejolak?

JAM: Saya kira ga, awalnya ada kekeliruan *sempet* dibetulkan juga pada akhirnya, karena *sempet* ada persoalan sedikit, tapi begitu direspon khususnya dari para anggota legislatif *incumbent*, kita lihat komit juga semuanya.

MH: Nomor urut satu itu *khan* nomor psikologis sebenarnya dari masyarakat

JAM: saya kira boleh saja, tapi kembali saya katakan tadi, nomor satu *khan* hanya satu dan bagi saya suara terbanyak ini memberikan satu pendidikan politik dan keperdulian politik terhadap masyarakat tapi barangkali ga 100% lah.

MH: Tapi hampir mayoritas nomor urut satu bang?

JAM: tentunya iya, karena yang saya katakana tadi nomor urut itu Cuma satu dan tentunya ada kriteria misalnya, *khan* ada ukurannya, kalau misalnya ketua OKK *gak* ada nomor urutnya *khan* jadi pertanyaan, bukan karena nomor urut satu itu, okelah nomor urut satu tapi itu juga *khan* akibat dari kinerja. Dan kinerja saya ini *khan* berdampak juga pada *networking* saya tapi ga semua yang

nomor urut satu menjadi pemilik suara yang terbesar, saya pemilik terbesar di dapil saya bahkan secara murni banyak suara saya diambil orang tapi saya ga perduli, Nah bahwa itu faktor psikologis iya tapi *khan* nomor urut itu *khan* ada standarisasinya

MH: Dalam hal pencalegan pakai *scoring* atau pakai apa?

JAM: saya kira iya, walaupun ga secara persis, tapi *khan* dengan adanya standarisasi udah ada *scoring* akumulatif, ga secara matematis kuantitatif tapi secara persentatif itu *khan* masuk

MH: Bagaimana membangun pola hubungan antara DPP dengan DPC ?

JAM: Yang pertama begini, saya mengatakan itu harus masuk dalam sistem, sistemnya ada aturan main, anggaran rumah tangga, juklak juknis atau peraturan organisasi, dst. Harus masuk dalam konstelasi itu, bahwa terjadi dinamika dalam sistem itu dalam konteks implementasinya pasti ada, dalam konteks itulah kita lakukan proses pendekatan-pendekatan, salah satu contoh kemaren saya mimpin Kaltim musdalubnya itu wacana yang saya denger itu akan terjadi, keesokan terjadi dua kubu yang akan rebut tapi karena saya sudah denger tentunya saya ga boleh cuek atau ga perduli, tapi ga boleh juga terlalu membesar-besarkan atau menjadi ketakutan, tentunya saya akan pelajari, *apa sih* faktornya? Apa yang menjadi penyebab isu itu muncul, itu harus dipelajari. Begitu saya pelajari tentunya orang yang terlibat dalam isu itu atau yang menyebabkan isu itu muncul, saya ngobrol dulu, saya mulai dalam permainan sistem, begitu saya jelaskan segala macam, *yah* akhirnya satu sama lain mengerti, kita ga tau *khan* siapa yang menimbulkan isu ini, bisa saja pihak-pihak lain yang ga suka, jadi suatu proses itu kondusif tapi juga *dimaintenance khan* orang internal, saya ga perduli siapa yang melempar isunya karena saya capek mencarinya, siapa yang terlibat dalam permainan isunya, *khan* orang-orang kita.

MH: Terus pola hubungan SBY sebagai Dewan Pembina dengan DPP Partai Demokrat untuk membangun hubungan yang baik, maksudnya tdiak adanya intervensi dalam hal-hal tertentu dalam kebijakan internal?

JAM: Memang terus terang saja, kita harus sepakat, inilah yang kadang-kadang orang salah paham, kadang-kadang DPP intervensi ke DPD, DPD intervensi ke DPC terus juga ketua pimpinan intervensi ke pimpinan yang lain, pertanyaannya apa *sih* yang dimaksud intervensi? Intervensi itu adalah sesuatu atau seseorang atau suatu kekuatan yang ikut mempengaruhi tapi bukan kewenangannya atau ga memiliki hubungan struktural atau hubungan organisasi di dalam, itu namanya intervensi. Katakanlah misalnya, utusan muktamar NU intervensi presiden, itu baru namanya intervensi tapi kalau sesama keluarga NU saling mempengaruhi itu menurut saya ga intervensi *dong*, begitupun Dewan Pembina memberi

masuk, memberikan arahan. Dewan Pimpinan Pusat memberikan arahan dan petunjuk ke DPD dan DPC.

MH: *clear* kalau itu pak, maksud saya, SBY menginginkan A kepada DPD tertentu terus dibuatlah pola itu tetapi aturan main sedikit terindahkan?

JAM: Saya kira itu ga ada, kalau ada misalnya ga usahlah SBY, DPD dalam konteks rekrutmen kemaren misalnya menginginkan si A dan si B, *khan* boleh-boleh saja tapi ga boleh keluar dari sistem, demikian juga dalam memberikan arahan tapi sistem harus tetap jalan *khan*

MH: Abang tahu ga bang berapa pilkada yang dimenangkan Partai Demokrat? sejak 2005-2007?

JAM: 15-20 berdasarkan koalisi. Murni itu hanya beberapa, kurang dari 2 persen, jarang murni itu, bisa dihitung dengan jari.

MH: Maksudnya bermain dalam kebijakan, maksud saya abang ini *khan* DPP, karena abang DPP, maka abang juga ikut andil dalam membuat kebijakan-kebijakan yang membuat dan menciptakan masyarakat berpartisipasi dalam pemilu 2009?

JAM: Sudah pasti dong, yang jelas kita melakukan pencerahan, katakanlah misalnya *gak* hanya dalam pemilu 2009 *iya toh*, dalam setiap kegiatan politik baik pilkada karena tentunya saya harus menunjukkan individu ke masyarakat bahwa saya adalah bagian dari mereka dan mau bersama-sama dengan masyarakat melakukan perbaikan² dalam konteks secara implementatif baik itu secara pendidikan politik maupun pragmatis pendidikan politik, nah tentunya dengan saya melakukan itu tentunya mereka akan melihat langkah² politik nasional maupun politik *local* maupun politik general yang akan saya lakukan itu udah pasti

MH: Kebijakan secara umum sehingga masyarakat ikut partisipasi dalam pemilu 2009?

JAM: Jelas *donk*, yang jelas bagaimana saya harus mengatakan, katakanlah di daerah misalnya Sumut, yang pertama dalam konteks, saya katakanlah sebelum kampanye, saya sebagai anggota DPR, pertama saya katakan gunakan hak suaramu, itu dulu karena belum kampanye pada saat itu, apapun yang Anda pilih bahwa nasib Negara ini, nasibnya saat ini ada ditangan kita semua, sehingga satupun menentukan nasib bangsa ini.

MH: Apakah kebijakan BLT, kebijakan KUR, merupakan kebijakan Partai Demokrat?

JAM: itu *khan* kebijakan pemerintah, itu dari SBY, bahwa itu kita lakukan, *pertama* kali dia lakukan pada saat kenaikan BBM yang luar biasa tahun 2007 kalau ga

salah, itu ide SBY, bahwa Partai Demokrat diajak untuk bicara iya, dan memberikan respon iya.

MH: Berarti Partai Demokrat ga pernah membuat kebijakan yang *original*?

JAM: Saya kira belum pernah. Tentunya harus kita bedakan SBY disitu *khan* bisa dua sisi, sebagai presiden dan sebagai ketua Dewan Pembina dan saya melihat dia dalam konstelasi pemerintah, saya lebih cenderung melihat dia sebagai presiden RI.

MH: terus kalau kebijakan eksternal yang sehingga mempengaruhi pemilih di 2009 itu bagaimana bang?

JAM: Iya tentunya, semua kebijakan yang dilakukan DPP Partai Demokrat kepada anggota fraksi juga pengurus partai Partai Demokrat, *pertama* supaya mensosialisasikan mengenai pemilu supaya menggunakan hak suara secara umum, bahkan terus terang saja, seperti misalnya saya, saya mempresentasikan KPU misalnya KPU Daerah mensosialisasikan acara-acara kunjungan saya pada saat itu, saya undang KPU daerah untuk menjelaskan proses pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif pada saat saya reses.

MH: Sebelum kampanye dong artinya?

JAM: iya dong, saya bilang *khan* pada saat saya reses, karena terus terang saja, walaupun saya ga kampanye, *value* terhadap Partai Demokrat dan *value* terhadap saya pasti ada walaupun acaranya umum bukan acara Partai Demokrat, acara saya sebagai anggota DPR, saya undang, saya fasilitasi anggota KPU untuk melakukan itu. Bukan program pemilu tapi saya suruh KPU untuk menjelaskan itu, karena waktu itu *khan* khususnya yang berkaitan dengan suara yang banyak itu *khan* simpang siur *khan*, saya presentasi di daerah, ada beberapa kabupaten kota saya fasilitasi dan KPU-nya senang. Nah itu saya ini *khan* dengan program-program saya, tapi program umum walaupun saya tahu adalah merupakan bagian dari proses kampanye, ga *pas* itu, ga spesifik.

Dr. Ahmad Mubarak (AM)
(Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2005-2010)
pada tanggal 4 Mei 2010 di Gedung Mubarak Institute
Jl. Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan

MH: Bicara masalah sejarah, sejak kapan aktif sebagai aktivis Partai Demokrat?

AM: saya *assabiqunal awwalun*, saya pengikut pertama, yang 9 orang. Kurdi Mustofa itu sesungguhnya masuk tim 9 tetapi *gak* tercantum karena dia militer aktif, dia selalu menjadi penyambung komunikasi, saya anggota MPR dengan Hartati Murdaya yang menandatangani SBY menjadi wakil presiden. yang menandatangani semua pokoknya ada 100 orang.

MH: Kenapa memilih SBY sebagai calon wakil presiden waktu itu tadz?

AM: Ketika itu dia (SBY) adalah sosok alternative ketika Gus Dur jatuh, Akbar Tanjung kita sudah tahu, Hamzah Haz kita sudah tahu. Yusril ga sampai, dia kepengen tapi ga sampai maju, SBY *feeling* aja kepengen tokoh masa depan ini jenderal juga, di MPR itu saya bertiga yang aktif betul, saya, Hartati Murdaya dan Sys Ns

Diawal pendirian partai Demokrat ada tim lagi namanya kelompok Cipayung, yang merupakan kelompok diskusi anak muda di lingkungan kantor Polkam, *Pak* Kurdi disitu, disitu tim Bambu Apus ada 5 atau 6 orang *gitu*, Yeni Wahid, Kurdi, Johan dll. Terus ada kelompok intelektual dari UI, *pak* Subur Budhisantoso, *pak* Saragih.

MH: posisi Vence dimana Ustadz?

AM: Vence adakah orang yang menjahit. kalau dia (Vence) itu seorang pengusaha yang saneng berkomunikasi, maka dia berkomunikasi disini, disini, pokoknya paling aktif menjahit karena dia pengusaha.

Lalu tiga ini bertemu, sebelumnya kita ga paham siapa-siapa, saya juga jalan sendiri. *Nah*, ketika *pak* SBY ga terpilih tetapi suaranya sangat signifikan kemudian hasil *pooling* di TV, waktu itu hasil *pooling* di TV itu masih baru, SBY dapet 400% dibanding Hamzah Haz, Hamzah Haz terpilih di MPR tapi *poolingnya* rendah, SBY *enggak*, makanya saya pikir ini presiden pilihan rakyat 2004, *pooling* khan yang memilih rakyat

MH: walaupun metodologi pooling di tv waktu itu belum jelas?

AM: iya tapi itu cukup memberi inspirasi, yang mikir itu tiga kelompok, kelompok Cipayung, Intelektual UI dan dari MPR, *nah* yang jahit itu Vence Rumangkang, diskusinya itu di Lagoon, saya dan Yeni Wahid itu *khan* udah kenal lama, Yeni Wahid selalu menggandeng saya karena inginnya saya jadi pegang, kalau dia maju sendiri ga enak jadi akhirnya saya terbawa terus.

MH: Bagaimana Posisi Hartati Murdaya?

AM: Hartati Murdaya itu hanya untuk presiden ga untuk Partai Demorat, karena dia pengusaha cari aman ditambah lagi suaminya di PDIP, tapi secara moral dia hubungannya dekat dengan pak SBY, maka dia selalu bantu tetapi diam-diam sampai pilpres, ke Partai Demokrat juga banyak bantu tapi diam-diam, kalau acara selalu ditempatnya dia, memberikan fasilitas.

MH: Katanya Krisna Bambu Apus yang membuat AD/ART yang disahkan oleh SBY?

AM: pada prinsipnya ini sering ketemu, tapi sesungguhnya gagasan besarnya dari pak SBY, saya sendiri lebih banyak ikut, lebih banyak dibawa lha, saya Cuma setengah aja.

MH: waktu itu ustadz mash PNS yah?

AM: saya anggota MPR, saya mewakili komunitas, jadi saya di DPR itu cendekiawan budayawan, saya sekjen Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Swasta, Badan Kerjasama Organisasi Swasta yang tadinya ketuanya pak Ahmad, Rektor UNISBA, saya masuk itu di kelompok cendekiawan budayawan. Pikirannya begini, kalau mau ngusung SBY tiga tahun lagi pake apa, pake partai yang ada *gak* mungkin jadi harus membuat perahu baru, perahu ini dibuat yah untuk mengusung SBY, karena problem nasional pada waktu itu krisis pemimpin nasional, *gak* ada yang meyakini semuanya, buat partai hanya satu yaitu SBY, pertanyaan waktu itu adalah *ya iya* kalau SBY mau, kalau *gak* bagaimana? Saya nyuruh pak Kurdi *nanya* ke SBY kalau kita nanti mau buat partai untuk mengusung SBY, bersedia apa *gak*? Kalau bersedia mau kita buat partainya, kalau *gak* yah enggak, pak SBY jawab mohon dikasih waktu 3 hari, saya mau shalat *istikharah* dulu, setelah pak SBY jawab *oke*, baru kita adakan pertemuan, pertemuannya juga pindah-pindah

MH: Tapi waktu itu *khan* pak SBY tidak memposisikan diri sebagai bagian dari Partai Demokrat?

AM: Gampang nya karena dia sadar masih menjadi MENKOPOLKAM, oleh karena itu nama dia sama sekali *gak* tercantum,

MH: Ada asumsi partai itu mengklaim SBY sehingga sempat terjadi kebimbangan partai?

AM: bukan mengklaim tapi memang pak SBY yang menginginkan karena etika, kita diklaim oleh orang, partai SBY, partai SBY tapi SBY *gak* pernah mau datang, itu semua karena etika, banyak juga yang bertanya ini bener *gak yah* partainya SBY. *Nah* dari kebuntuan itu, saya dengan pak Sukartono *ngelamar* SBY di Semarang kira-kira belum setahun berdirinya partai sekitar tahun 2002, abis ketemu kyai di Pati kemudian saya bilangi “ *Pak, ini khan masyarakat kurang percaya ini partai bapak, saya usul bagaimana kalau Ibu jadi wakil ketum?* lalu disetujui oleh SBY.

MH: Berarti proses menerima itu panjang juga yah?

AM: iya setelah itu khan wakil ketua umumnya 2, Ani Yudhoyono dan Vence Rumangkang yang sebelumnya beliau adalah bendahara, ketika pertemuan di Bogor, pertemuan nasional, saya yang memperkenalkan bu Ani karena saya yang jadi moderator, setelah itu orang baru percaya ini partai SBY jadi pak SBY itu betul-betul memegang etika, sebulan sebelum masa kampanye pemilu legislatif, SBY mengundurkan diri karena dia dilecehkan oleh ibu Mega juga, karena dia *gak* diajak, rapat penting bidang POLKAM *koq* menterinya *gak* diajak

MH: Waktu itu bukannya disensor Pak Sudi, katanya surat masuk tapi Pak Sudi menggunakan institusinya untuk memblow-up?

AM: Pak Sudi enggak, kita tahu bu Mega itu sifatnya suka ngambekan, dan itulah momen yang sangat tepat untuk mengundurkan diri dan hari itu juga memulai kampanye partai Demokrat, gegap gempita luar biasa.

MH: Kejadiannya seperti Mega ya tadz yang disakiti oleh rezim Orde Baru?

AM: *Nah* ada citra seperti itu, yang jelas masyarakat sedang bingung mencari sosok *figure* pemimpin, terus terang awalnya pak SBY modalnya cuma sosok yang santun dan gagah

MH: kerugiannya Mega itu *khan* selalu memberi peluang kepada SBY? maksud saya dalam momentum apapun dalam masalah kebijakan selalu memberikan peluang kepada SBY untuk menginformasikan kepada masyarakat Indonesia?

AM: Memang itu karena ketidakmampuan Mega, Mega memang *gak* mampu, dan wajar seorang presiden mewakilkan kepada menterinya, itulah yang membuat sakit Mega, seakan-akan SBY *gak* membalas budi, dikasih peluang malah nyalib tanpa izin, masyarakat memang merindukan perubahan dan SBY menawarkan perubahan kayak Obama

MH: Ada yang menarik ustadz, dalam penentuan ketua umum, awalnya berdirinya Partai Demokrat *gak* ada yang mau untuk posisi itu?

AM: Memang awalnya masih bertanya-tanya siapa ini ketua umumnya, yang main waktu itu Vence, pengennya dia yang jadi ketum itu bisa *dikendaliin* oleh dia, ketika dia (calon ketum) *gak* nurut dia cari orang lain, jadi konflik terus, saya orang yang *gak* terlibat dalam konflik karena saya lebih banyak ikut-ikutan, saya masih lebih banyak jadi dosen tapi saya seneng aja, maka ketika konflik itu semakin tajam sewaktu-waktu, saya lawan 90 orang itu. Ketika konflik Subur yang dipecat oleh Vence tapi ditolak oleh menteri Hukum dan HAM, pas rapat dipecat lalu diganti prof Ramli, saya sendirian yang menolak itu.

MH: Ada kebijakan itu ketua umum Jawa Islam, Sekjen luar Jawa

AM: Salah satu yang membuat itu, umpamanya sekjen yang pertama khan Irzan Tandjung, dia Kristen, ada yang *ngusik-ngusik* pengen diganti, yang *ngusik-ngusik* malah Yeni Wahid karena dia kepengen jadi Sekjen tapi akhirnya malah dia yang terlempar lalu dimasukin ke Dewan Pakar, lalu keluar terus Umar Said akhirnya sekjen-nya EE Mangindaan

jadi ada juga dicitrakan waktu itu Partai Demokrat itu Partai Kristen, *nah* oleh karena itu jugan sekjen-nya orang Kristen, ini demi kepentingan, bahkan pak SBY minta “*coba dibawa 10 orang tokoh-tokoh NU untuk jadi pengurus*, ketua umumnya juga cari salah satu dari ketua PBNU, Ahmad Bagja dihubungi untuk jadi ketum, dia sama sekali *gak* bisa mengapresiasi partai baru, emang Partai Demokrat ada duitnya, responnya begitu, akhirnya yang menghubunginya pak Yazid *bilangin* bahwa orang ini *gak* penting, dia *gak ngerti* bahwa Partai Demokrat akan menjadi partai besar, seandainya dia punya *feeling* itu pasti dia bersedia.

Jimly juga saya yang menghubungi dengan pak Vence untuk menjadi kira-kira mau diplot jadi Menteri *lha* tapi dia bilang masih PNS, dia lebih memilih jadi PNS aja, dia (jimly) inget betul bahwa yang menghubungi dia itu saya dan pak Vence.

MH: Bagaimana persiapan Kongres I yang sempet adanya konflik?

Ketika Kongres sebelum pemilu ada konflik, saya berdiri menentang pemecatan pak Subur di Bidakara, sendirian itu saya, saya bilang enggak bisa, paling-paling sekarang itu membentuk tim persiapan kongres, penggantian kongres disitu.

Subur itu naluri, naluri sosiolog jalan, dia *gak* konflik tapi jalan terus tapi akhirnya dipecat, *nah* susunan baru yang ketumnya Prof Ramli dikirim ke Departemen Hukum HAM ditolak tapi *de facto* tetap, ketika kongres ada 2 kubu, kubunya Subur dan kubunya Ramli, kalau ini ditunjuk, ini *gak* setuju, kalau ini

yang ditunjuk ini juga *gak* setuju, satu-satunya yang *gak* terlibat konflik cuma saya maka akhirnya saya jadi ketua kongres, itupun masih mau di distorsi oleh pak Vence susunannya, tapi saya enggak mau, nah saya jadi ketua kongres, kongres kita itu betul-betul dilakukan oleh komponen partai, Hadi Utomo dimasukkan, kenapa? Karena kita butuh orang yang komunikasinya mudah dengan pak SBY jadi cari yang keluarga

MH: Siapa yang masuk kabinet dari Partai Demokrat?

AM: Ketika penyusunan kabinet, itu ternyata Partai Demokrat cuma dapat dua menteri banyak yang marah-marrah, yang masuk hanya Taufik Effendi dan Jero Wacik.

terus marahnya pada kelewatan, bahkan ada yang bilang, ya udah kita tinggalin aja, sampai kedengaran sama ibu sepuh, ibu Sarwo Edi, lalu dia bilang bahayanya kalau partai Demokrat dipegang oleh orang lain harus cari orang yang punya hubungan keluarga

MH: Punya pikiran sampai situ ya tadz?

AM: iya ibu sepuh bilang bahaya ini kalau dipegang oleh orang yang *gak* punya hubungan keluarga, kalau parah cerai

Lalu ada kelompok *pembonceng* adalah kelompok yang melihat bahwa kedepan ini partai ini luar biasa, maka secara rahasia menjadi tim sukses pak Hadi, sebelumnya pak Hadi *gak* dikenal tapi timnya yang waktu itu ikut pilpres, Marzuki Alie, Jhonny Allen

MH: Jhony Allen pemain baru juga ya tadz?

AM: Enggak dia dari awal, pak Subur yang bawa

MH: terus pembonceng itu maksudnya?

AM: pembonceng itu maksudnya bukan untuk memperjuangkan Hadi Utomo tapi supaya agar dirinya kebawa, itu timnya rapi sekali, enggak ada yang tahu, pak SBY pun *gak* tahu

MH: siapa yang didukung SBY?

AM: Pak SBY itu dukung Sukartono, sampai 2 hari sebelum pemilihan, kata mas Kurdi, "Mas, bapak (SBY) dukung pak Sukartono *lho?* Masa iya mas baru tahu, mas Sukartono itu di dukung oleh Tomi Winata sama Aksa Mahmud, saya aja di *datengin* utusan Tomi Winata, ditawarkan duit 5 atau 10 milyar untuk bantu, semua ditawarkan, akses *lha..* lalu terjadilah disini kesepakatan untuk menjegal Sukartono tanpa sepengetahuan pak SBY karena harus melewati persyaratan yaitu harus S1, yang kedua menjegal Hayono Isman lalu Sys Ns juga kena, saya juga *gak* tahu kalau pak Hadi Utomo diusung begitu

MH: Berarti ide dasarnya dari ibu suri?

AM: iya ibu suri, ibu suri ditangkep temen-temen

MH: Alasan prasyarat S1?

AM: ada logikanya, masa jadi ketua umum Prof terus sekarang yang gak lulus S1, sama juga Hayono Isman dijegal karena belum pernah jadi pengurus, pokoknya pernah jadi pengurus di tingkat rantingpun *gak* apa-apa, kalau dia *khan* belum pernah, padahal Hayono Isman sudah deklarasi, pada Magrib, saya dipanggil pak Sukartono, maunya dia saya dijadikan wakil ketum tapi saya enggak mau. Terus pak Hadi Utomo, saya ditanya bagaimana pak suara bapak? Saya *tu* gak paham

MH: Taufik mencalonkan menjadi ketua Umum?

AM: iya nyalonin tapi dia *khan* waktu itu, mengundurkan diri terus mengatakan suara diberikan kepada pak Subur

MH: Kenapa mengundurkan diri padahal dari segi kelayakan dia punya?

AM: dia udah merasa *gak* akan terpilih . didaerah banyak daerah yang konflik, makanya kalau pilih Hadi Utomo aman dan ketika itu mengatakan pak Hadi Utomo itu adiknya SBY.

MH: Setelah kongres itu khan konflik? Pak Vence marah-marrah seakan-akan *gak* dihargai dalam kongres

AM: bukan begitu, pak Vence itu *player* sangat dominan, *nah* sudah *ga* masuk, beliau *khan* masuk ke Dewan Pembina, terhormat *khan* mestinya. Tapi Dewan Pembina itu *ga* bisa bermain proyek, kenapa dia ditaruh disitu karena dia *player*, *player* itu dia selalu membiayai, sesungguhnya dia dapat lebih banyak, *nah* karena tahu seperti itu maka dikasih ruang sempit.

MH: Pak Vence itu waktu di Bali dukung siapa?

AM: saya lupa dukung siapa, Kartono kayaknya. Jadi setelah Bali pak Vence memang tersisih, *gak* bisa mengatasnamakan, ujungnya dia bikin partai sendiri karena dia pemain maksudnya proyek sana, proyek sini.

MH: Posisi Ustad sebelum wakil ketua Umum apa ya?

AM: Waktu pengurus masih sepuluh orang jadi Akte Pertama, saya salah satu ketua juga kemudian Akte yang departemen Hukum dan HAM, saya sahnya ketua OKK setelah kongres saya niatnya sudah mau kembali ke habitat saya, saya pikir *yah* sudahlah mungkin sampai disini saja. Tiba-tiba tadinya ketumnya Prof

Ramli, meninggal lalu Jhonny Allen, Jhonny Allen juga dapat karangan bunga sebagai wakil ketua umum, tiba-tiba pak SBY 30 menit sebelum diumumkan hasil *floor* dia intervensi di rapat, dia bilang “*mau dibawa kemana partai ini?*” wakil ketua umum *gak* boleh orang lain, harus pak Mubarak, perintahnya seperti itu, tanpa ada yang memberitahu saya, pak SBY *gak*, pak Hadi *gak*, nama saya sudah tercantum. Ketika diumumkan di TV saya sendiri *gak* ngikuti, saya ditelepon orang, selamat *yah* pak Mubarak jadi wakil ketum, saya bilang *ah ngacok aja*, terus dia bilang itu diumumkan di TV, pak Hadi *gak* pernah ngomong ke saya bahwa saya waketum, setelah diumumkan pun dia tidak ngomong ke saya, pak SBY setelah setengah bulan, saya baru ketemu waktu acara Majelis Ulama, beliau bilang tugas pak Mubarak itu mengamankan semuanya, berbekal itu saya di DPP enak aja, saya udah punya khusus *koq*, yang *naroh* saya *khan* pak SBY, bukan Dewan Pembantu jadi di DPP tidak ada yang berani *ngutik-ngutik* saya, jadi seenaknya aja.

MH: formatur itu katanya ini ya pak didominasi oleh Marzuki?

AM: iya oleh tim sukses *lha*, timsesnya itu Marzuki, Jhonny Allen cs *lha*

MH: Anas Urbaningrum kenapa masuk dalam struktur?

AM: kalau anas pesenannya pak SBY dari sejak sebelum kongres, beliau bilang “*tolong tokoh-tokoh muda seperti Anas dimasukin*” jadi watak NU itu dibawa mau tapi berusaha masih lemah, kalau HMI itu nerobos masuk, ga ada yang bawa juga masuk, saya bawa 10 orang tuk caleg, sampai hari terakhir *gak* bisa melengkapi kelengkapan administrasi karena pemeriksaan kesehatan waktu itu sejuta,

MH: Pasca kongres khan nyusun masalah strategi, nah kebetulan tesis saya ini khan mengenai strategi Partai Demokrat periode 2005-2010, saya ingin melihat pada anggapan bahwa kemenangan partai Demokrat itu sebenarnya bukan kemenangan partai tapi kemenangan SBY, jadi semuanya faktor yang paling dominan adalah SBY, nah saya ingin menelusuri secara ilmiah apakah DPP bekerja secara strategi dan sistematis?

AM: *gini* itu kecerdasan orang mengelola *asset*, *asset* yang dimiliki itu SBY, yang kedua sasarannya adalah masyarakat bawah, ini kemudian soal SBY itulah yang kita kelola, dimulai dari apa, semua orang (kader) buat kartu nama ada SBY nya, foto SBY ada dimana-mana, SBY itu menarik di depan publik secara nasional, umpamanya *pas* iklan Indomie, yang lagunya -SBY PRESIDENKU-, itu dikritik habis oleh pengamat, katanya tidak kreatif terus saya bilang kita bukan lagi lomba, iklan ini bukan untuk diuji oleh pengamat, iklan ini untuk konsumen dan konsumennya adalah masyarakat bawah, masyarakat bawah senang lagu indomie itu lalu kita uji, ada 100 pengamen di Jakarta kita kumpulin kita kasih jaket hitam SBY-BOEDIONO kemudian kita kasih jaket itu hanya untuk *ngamen* lagu itu, di kereta dimana-dimana lagu itu, saya yang jadi komentator,

segitu luar biasa, contohnya di restoran Padang orang abis makan, terus ini ada lima orang pake jaket SBY-Boediono lalu nyanyi lagi SBY presidenku, lalu orang-orang langsung keluar dan ikut nyanyi, nah ini sesungguhnya kecerdasan partai Demokrat mengelola asset

MH: Maksud saya pasca terpilihnya pak Hadi 2005-2010, mulai 2005 itu yang pasti konsolidasi internal tingkatan DPC dll terus bagaimana cara mengatasi konflik, menurut saya tahun 2005 Partai Demokrat belum bisa dikatakan partai besar bahkan *networking* di tingkatan anak ranting dan ranting belum banyak terjamah, saya ingin melihat pada kebijakan internal partai dan kebijakan eksternal partai, ustadz sebagai waketum paham bagaimana mendesain partai dari 2005 sampai menjadi 2009 partai yang sangat besar?

AM: Memang dari awal yang dikedepankan adalah fatsun politik, cerdas, santun, bersih, demokratis, dalam praktek kita belum bisa, dalam praktek konsolidasi oraganisasi sering *gak* santun sering *gak* cerdas, *gak* bersih dan sering *gak* demokratis, jadi kadang-kadang *gak* demokratis karena ada intervensi atau segala macam *lha* tetapi ada dua magnet yang sangat kuat, SBY dan magnet Bendera

MH: Bendera maksudnya?

AM: Bendera itu memukau, kalau kita habis rapat umum, bendera dimana-mana tapi setelah itu hilang, semula kita berpikir itu sabotase, tetapi ternyata tidak, diambil oleh kader lalu dipasang di rumahnya masing-masing, akhirnya bikin lagi, makanya setiap kali rapat umum, orang bermotor bawa bendera Demokrat banyak sekali, biru-biru semuanya, itu luar biasa, sementara bendera PAN tidak ada yang ambil, maka ketika rapat dengan ketum warna biru itu sangat dominan dan itu magnet bahwa Demokrat juga besar, oleh karena itu realita antara kepengurusan dengan kemenangan itu sering tidak *match*, contoh: daerah sini belum ada pengurusnya tapi Demokrat menang, oleh Karena itu kita sadar, makanya bendera banyak yang hilang tidak usah disesali.

MH: Untuk eksternal, ada kapitalisme program?

AM: yang kedua, kaderisasi nasional, tidak ada partai yang mengangkat kaderisasi 1 angkatan 2 minggu yang bekerjasama dengan NDI itu, konsepnya yang kita ambil, tadinya NDI nya aktif tapi dikritik orang jadi rusak, jadi tentang pemasaran politik dan segala macam, itu termasuk sejarah juga dalam waktu 2 minggu 1 angkatan dan 1 angkatan itu ada 100 orang, kader di seluruh Indonesia, jadi di satu DPC itu paling tidak ketua umumnya, sekjenya, bendahara dan 1 perempuan, jadi semua perwakilannya 4 orang.

MH: wajib itu perempuan tadz?

AM: iya wajib, tempatnya dipuncak, 8 kali 2 minggu, efeknya sangat besar, kader daerah, kalau ada konflik dan konfliknya adalah bagaimana membesarkan partai, Karena kebanggaan itu, nanti diakhir pasti semuanya dibawa ke Cikeas, tambah lagi waktu itu jadi pada umumnya kader Demokrat bangga pada SBY dan yakin tentang masa depan, itu orang luar yang *gak* tahu, bahwa kita melakukan satu langkah strategis, disamping *asset* yang dua ini. Yang belum terbangun adalah kultur politik, kalau Golkar kulturenya begitu, PKS kulturenya begitu, Demokrat belum, kalau mesin jalan tapi kabel-kabelnya ini masih banyak yang putus, untungnya itu magnet, ceritanya komunikasi tidak lancar, konflik sebesar apapun kalau sudah ada pak SBY diselesaikan.

MH: Jadi begini tadz, kenapa saya tadi bilang adanya *claim* program pemerintahan SBY. SBY tidak akan jauh berbeda dengan Megawati kalau seandainya tanpa program yang pro rakyat, karena disadari atau tidak disadari BLT adalah program pemerintah yang mempunyai dampak positif terhadap Partai Demokrat?

AM: Pertemuan di Chili, Indonesia dipuji oleh dunia. bahwa itu berdampak citra oke, namanya semua pemerintah, semua programnya untuk menarik simpati masyarakat

MH: Maksud saya partisipasi masyarakat untuk memilih Demokrat di 2009 itu tadz? Tanpa program sby sama aja tadz?

AM: Tapi itu program pemerintah bukan program partai

MH: khan makanya program SBYnya *diclaim* tadz?

AM: Makanya saya bilang asetnya itu adalah SBY, SBY dengan segala keberhasilannya,

MH: seandainya SBY tidak ada program bisa sama tadz?

AM: *yah* belum tentu, sebab BLT itu *khan* tidak hanya milik orang bawah, ketika Megawati memprotes, orang PDI marah memprotes BLT, mereka bilang orang ini riil belum pernah saya diberi uang oleh negara, jadi saya kira semua pemerintah semua yang dikerjakan yang namanya *wong cilik* atau segala macam, semuanya itu teruji, justru pertemuan di Chili itu membicarakan cara mengatasi krisis, apapun krisis di Indonesia, kita masih lebih baik, indeks naik, padahal demo tiap hari disini

MH: Bagaimana mendesain Partai sehingga menjadi partai besar?

AM: kartu anggota, pemilu tahun 2004 kita punya 10 juta kartu anggota, yang milih itu 7 juta lebih, itu yang buat DPP tapi DPD diberi kewenangan, karena belum sentralisasi kemudian ketika pemilu 2009 target kita 15 persen hasil rapimnas,

tetapi ditikung oleh PDIP dan GOLKAR dengan menaikkan persyaratan mencalonkan presiden 20%, saya pagi-pagi datang sama Pak Syarif Hasan datang ke pak JK lalu bilang: Pak, ini terlalu ekstrem pak, masa 2,5% langsung naik ke 20%, Demokrat pikir sudah cukup moderat jadi mohonlah Golkar menurunkan 15%, jawabannya udahlah itu untuk kepentingan yang lebih besar, udahlah ambil 20% aja. Ketika jawabannya tidak bisa lalu dilaporkan ke SBY, beliau bilang, sudah kita terima saja, *bismillah*. Kita naikkan target kita menjadi 20% lalu kita genjot KTA berasuransi, KTA itu 25 juta, dari 10 juta jadi 25 juta dan KTanya itu ada gambar SBY dan asuransi, orang kampung datang ke saya lalu bilang kalau bisa uangnya bisa diambil sekarang, saya bilang ini uangnya bukan uang Partai Demokrat tapi uang asuransi, yang bisa ambil bukan bapak tapi ahli waris, mereka senang banget dapat asuransi tapi tahu makna sesungguhnya untuk apa. Teorinya dari 10 pemiliknya 7,5 dan dari 25 pemiliknya 22 atau 23 gitu untuk memilih

MH: Sistem pencalegan, sekarang *khan* ada sistem nomer satu, dua dan tiga, walaupun memang ada keputusan MK, tapi angka satu itu sebagai angka psikologis menurut ustadz?

AM: pada mulanya sistem pencalegan itu pengaruh elit partai, Ibas nomor satu, anaknya ketum nomor satu, dimana-mana kayak *gitu* lalu timbullah protes, jam 10 malam saya sms pak SBY harus ada intervensi, banyak orang yang selayaknya tidak menduduki nomor urut satu, saya beri contoh misalnya dapil ini seharusnya begini, dapil dua begini, dapil tiga begini, setengah jam saya dapat jawaban, katanya itu *khan* tanggung jawab ketum, waketum, sekjen. Pas jam 11 ajudan nelpon katanya ada *fax* langsung perintah yang isinya memberikan perintah kepada ketum, waketum, sekjen dan kebawah untuk menyelesaikan daftar nomor urut pencalegan dengan pedoman seperti ini, satu, dua, tiga dan empat, contoh: nomor urut satu harus memiliki kriteria seperti ini, contoh Ibas tidak boleh menempati nomor urut satu karena dia orang baru, terus beliau bilang jam 8 pagi saya tunggu hasilnya. Maka akhirnya Ruhut tergeser yang tadinya nomor urut satu, *nah* setelah itu baru ada keputusan MK sebelum ada ketentuan suara terbanyak.

MH: Jadi waktu itu, keputusan DPP itu udah selesai nomor urut satu sampai seterusnya udah ditanda tangani ketum ya tadz?

AM: iya udah dan akhirnya berubah lagi, tapi kemudian ada keputusan MK dengan suara terbanyak itu.

MH: Partai Demokrat sudah mengambil kebijakan suara terbanyak sebelum keputusan MK?

AM: iya tetapi tidak berhasil, itu aspirasi pinginnya yang terbanyak, KPU itu domainnya partai tapi KPU tidak akan memperhatikan itu, terus terang kita miskin kader, maka kita terbuka mengundang siapa saja yang ingin

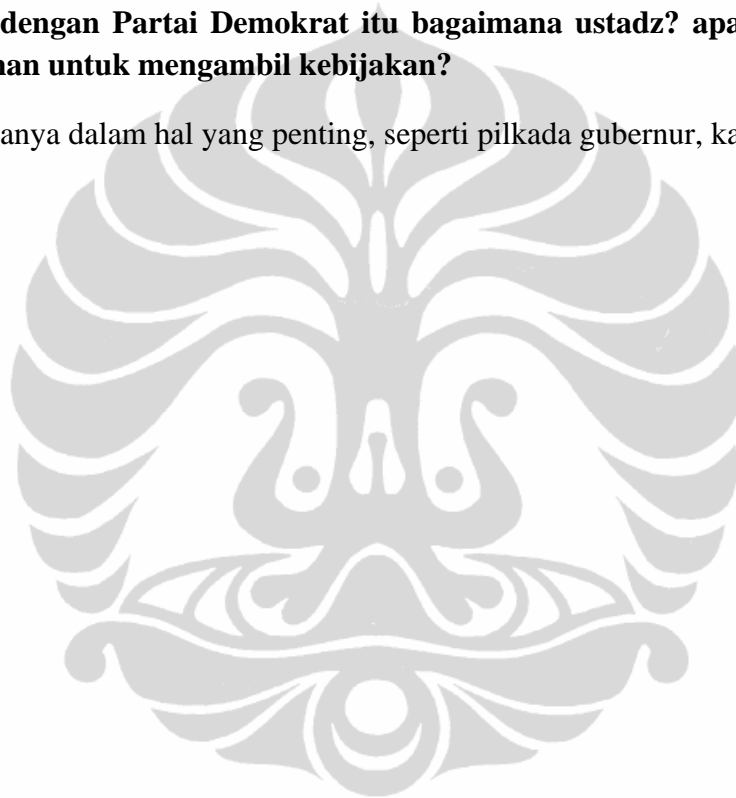
mencalonkan diri lalu banyak yang masuk, misalnya saya udah punya KTA, saya kepengen jadi anggota DPR dari Aceh, tiba-tiba Aceh penuh *khan* maka dia dilempar ke Jawa Timur, banyak terjadi seperti itu, jadi tidak semua yang daftar orang luar yang memperoleh tempat sebagaimana yang diinginkan. *Khan* sudah ada kuotanya, Aceh sekian, daerah ini sekian juga perempuan sekian. Malah sekarang paling banyak perempuan dari seluruh Partai

MH: apakah ketua umum yang tidak mengambil legislative dan eksekutif sebagai bagian dari kebijakan?

AM: kebetulan saja, ketum memang tidak tertarik, saya juga tidak tertarik

MH: relasi SBY dengan Partai Demokrat itu bagaimana ustadz? apakah SBY lebih dominan untuk mengambil kebijakan?

AM: enggak, dia hanya dalam hal yang penting, seperti pilkada gubernur, kalau bupati enggak



TRANSKRIP TESIS

6 APRIL 2010

WAWANCARA DENGAN KURDI MUSTAFA DI GEDUNG VETERAN SEMANGGI LT 15 JAM 12.30 TENTANG SEJARAH PARTAI

Muslim Hafidz:

Bagaimana awal sejarah berdirinya Partai Demokrat?

Kurdi Mustofa:

Pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden 27 juli 2001, malam Jumat SBY masuk pada putaran ronde kedua, pada saat penghitungan, saya bilang sama SBY kita pulang aja ke Lagoon Hotel Sultan, SBY menjawab perhitungan belum selesai, tapi saya bilang bapak tidak akan menang, maka diam-diam kita keluar, naik mobil Landcruiser, mobilnya SBY, saya duduk di belakang sama SBY, di dalam mobil itu saya bilang, “Kalau bapak masih punya mimpi untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan tanpa partai politik itu omong kosong, SBY tidak ada komentar, kemudian masuk ke Lagoon Hilton, paginya jam 8 SBY telpon saya, “*Kur kamu masih di apartemen?*” Saya jawab “*masih pak*”, kemudian SBY bilang “bisa gak kita konfrensi pers?” saya siapkan konfrensi pers, saya undang teman wartawan dari kementerian politik dan keamanan. Datang ke Lagoon kurang lebih jam 9, SBY konfrensi pers, intinya mengucapkan selamat kepada Hamzah Haz, yang *kedua* mengakui kekalahan, yang *ketiga*, minta maaf kepada konstituen, setelah itu rupanya SBY merespon masalah partai itu, menurut SBY kalau partai politik itu kedepannya merupakan keniscayaan, saya tengah berpikir bagaimana merancang partai politik itu. Ternyata dalam hati saya bahwa omongan saya yang tidak dijawab itu ternyata di respon.

setelah Jumat malam, saya ke Cikeas dengan Yani, disitulah kita diskusi dengan SBY, saya pertanyakan, bapak tadi khan memberikan isyarat untuk pembentukan partai, bagaimana sebenarnya duduk perkaranya? dia jelasin partai itu panjang lebar, termasuk ideologi, itulah yang sekarang menjadi *platform* partai Demokrat, nama Partai, SBY yang memberikan nama, saya tanya namanya apa pak, namanya Demokrat.

Singkat cerita sabtu pagi, saya minta Yani sama Arifin ke posko Krisna, saya suruh Yani untuk membuat anggaran dasar rumah tangga (AD/ART). Kemudian saya bilang ke Yani “*Model nyontek ajalah ke partai Republik*“, itu dikerjakan selama seminggu.

Bendera Partai Demokrat itu saya suruh Arifin, saya bilang” *fin saya itu punya mobil landser, khan ada symbol, tolong kamu bikin kayak gitu*”, jadi tahap awal, bendera itu saya siapin, Arifin yang menggambar di computer, awal pembuatan bendera tidak berbentuk mercy yang sekarang, kemudian bendera tersebut SBY merubahnya, itu SBY perintahkan ke saya, katanya “*coba kamu lihat bendera didepan Hotel Saripan Pasifik, itu khan bagus, itu khan birunya di tengah jadi tidak monoton*”.

Bendera pertama sebagai gagasan dasarnya, yang segitiga, SBY *khan* selalu tiga tiga tiga, terus ini penutup lima it menandakan pancasila, Arifin yang bikin itu.

MH: Apa posisi bapak ketika itu?

KM: Saya sebagai sebagai staf pribadi, saya di polkam, tetapi SBY minta ke pak Agum Gumelar supaya saya membantu SBY jadi staf pribadi.

MH: Apa yang dimaksud dengan tim Krisna Bambu Apus?

KM: Tim krisna wayang itu tokoh prabu Krisna, tim krisna itu sebetulnya *image building* tim SBY sewaktu SBY jadi kasospol maupun setelah menjadi Menteri Koordinasi Politik dan Kemanan (MENKOPOLKAM), untuk *control opini* dari segi pencitraan. Tim Krisna Bambu apus sudah dari 1997an, waktu SBY jadi kasospol. Keanggotaannya, Saya sebagai koordinator, Yani Wahid dan Wasis. Sedangkan Arifin Jauhar sebagai operatornya, urusan ketik. Tim Krisna, ketika SBY menjadi Menkopolkam bertugas sebagai *media report*.

MH: Dalam Tim Krisna Bambu Apus, apakah Yani Wahid berasal dari angkatan?

KM: bukan, tapi sekjen partai Republik

MH: Jadi gagasan dasar bendera partai Demokrat adalah Kurdi Mustofa? (penegasan tentang ide dasar bendera partai Demokrat)

KM: Betul, Itu harus Anda tulis tuh,

MH: Setelah selesai AD/ART Partai Demokrat apa langkah selanjutnya?

KM: Saya ditunjuk sebagai penghubung antara partai dan SBY, setelah semuanya selesai, AD/ART, bendera selesai, saya sama Yani diskusi “*Siapa nich yan yang mau mengeksekusi Partai ini, ini SBY belum tahu nih, belum tahu kalau diskusi itu kita tindaklanjuti.*” kemudian kita bertemu sama Vence, kemudian ditindak lanjuti oleh Vence Rumangkang. Akhirnya dikumpulkanlah beberapa teman Vence, termasuk ada 11 orang. Singkat cerita didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM dan masuk dalam Lembaran Negara.

MH: Partai Demokrat masuk Lembaran Negara itu tgl 10 September ya mas?

KM: *La iya*, tapi itu di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah masuk duluan, kemudian diserahkan ke SBY, kita bertiga sebagai hadiah ulang tahun SBY, SBY kaget tuh, jawaban saya: “*ini kita hanya mengamankan pak, supaya partai Demokrat yang sudah bapak sebutkan itu dipakai orang lain, hanya itu saja soal nanti ditindaklanjuti atau tidak, kita tunggu perkembangannya nanti.*” Setelah itu saya suruh Vence supaya segera dibentuk kepengurusan tingkat pusat sampai ke daerah, kantornya pertama kali di jalan Ahmad Yani Patra Kuningan.

MH: Bagaimana Posisi SBY

KM: SBY ngomong sama saya “saya jangan disangkut pautkan dulu dengan partai Demokrat, karena saya ingin konsentrasi dulu. Nah kalau tidak salah pada bulan Desember, pertemuan pertama di rumah dinas Widya Chandra SBY mengatakan bahwa kalau masuk dalam Kabinet maka tidak masuk dalam struktur partai Demokrat dan akan konsentarsi pada jabatan menteri.

Januari 2002 sejak saat itu, SBY menunjuk saya sebagai *listen officer*, sebagai penghubung dari dan ke partai, itu saya lakukan secara efektif sampai dengan Mei 2003 secara maraton, jadi kalau SBY “marah” dengan orang-orang Partai Demokrat itu, saya dimarahi dan saya ganti marahi dia, kalau orang-orang partai itu ada maunya juga melalui saya, itu sampai Mei pertemuan hotel Nirah 2003, setelah itu intensitas komunikasi saya sebagai penghubung mulai turun karena dengan masuknya hadi utomo, dengan masuknya ibu sebagai wkl ketua umum partai, hadi sebagai sekjen itu di thn 2003 tp wktu kampanye partai Demokrat 2004.

MH: Bapak ini khan masih militer aktif? Berarti bapak melanggar aturan?

KM: Itu resiko politik lah, saya *khan* tidak aktif dipartainya, tidak juga masuk dalam struktur, tapi membidangi, mengeksekusi itu saya terlibat. : Iya klu saya itu udah siap dengan resiko politik, kalau dipecat, pecat, tapi sebetulnya yang bertanggung jawab *khan* SBY membiarkan saya seorang militer aktif dalam politikpraktis.

MH: Pak Vence posisinya waktu itu bagaimana?

KM: Waktu kepengurusan pertama Vence Rumangkang sebagai bendahara umum, karena dia nasrani tidak mungkin jadi ketua, pertemuan di PIKOK itu kita minta supaya ketuanya orang Jawa dan beragama islam, maka Subur itu diminta. Waktu itu jabatan ketua umum ditawarkan karena memang tidak ada yang mau. Pada proses perkembangannya, Subur itu diminta jadi ketua *khan* hanya untuk agar dapat segera didaftarkan ke departemen Hukum dan HAM, sekjen-nya *khan* Ihsan Tanjung. Ihsan Tanjung itu hanya untuk melengkapi.

Tapi setelah 2003 dimana pertemuan Mirah di Bogor, diluncurkan vcd SBY kemudian diedarkan kemana-mana, SBY menyatakan bahwa sejak saat ini saya menyatakan diri sebagai bagian dari keluarga besar partai Demokrat, *nah* itu baru orang mau jadi pengurus, berebut *tuh*, yang sebelumnya itu ditawarkan tidak ada yang mau.

MH: Bagaimana posisi SBY yang tidak mau 100% badannya di Partai Demokrat?

KM: Oiya sangat, jadi betul-betul dia itu jaga jarak, dia *all out* itu setelah dipecat sama Megawati

MH: bagaimana proses masuknya Ani Yudhoyono dan Hadi Utomo?

KM: Endak, jadi gini lho, masuknya hadi utomo itu saya yg minta, saya lapor ibu pertama “bu, klo saya boleh saran, ibu *khan* juga ada kesibukan? Sebaiknya kita masukkan Hadi ke dalam partai. Jawaban ibu apa, *ya sudah* kamu lapor ke bapak, lalu saya lapor ke bapak, “*pak izin pak kalau bapak berkenan pak Hadi juga masuk di partai Demokrat*”, bapak enggak jawab “*yah nantilah*” katanya, seminggu kemudian saya dikasih tahu ibu, “*di, itu bapak sudah izinkan, kamu telpon aja ke Vence*”, saya telpon Vence: *pak vence, tolong itu dikeluarkan surat keputusan pak Hadi Utomo untuk masuk partai, posisinya terserah aja dimana*, tujuan saya awal-awalnya kalau ada keluarga ada disitu saya mulai enak, *gak* jadi saya pendukung ke partai terus, itu tujuanku, *nah* mulai saat itu saya keluar secara perlahan.

MH: Bicara masalah AD/ART dan flat form partai Demokrat, apa yang dilakukan oleh tim krisna?

KM: *Oiya*, semua dari TIM KRISNA, dan itu semua sumbernya SBY. *Brainstorming* SBY itu yang kemudian ditindaklanjuti oleh TIM KRISNA, saya sama Yani berdiskusi dengan SBY kemudian ditindaklanjuti dan diterjemahkan apa yang berdasarkan SBY inginkan.

MH: bagaimana peran Vence Rumangkang?

KM: Pak Vence itu mendaftarkan, Sutan Batugena itu mencari pendiri, setelah barang itu ada baru *diglundingkan* gitu lho, tapi kan yang mahal itu gagasan dan ide yang awal, kalau itu tidak diimplementasikan tidak mungkin akan lahir Partai Demokrat, jadi saya sama Yani itu boleh dikatakan pintunya.

MH: Siapa saja TIM KRISNA Bambu Apus itu?

KM: TIM KRISNA itu hanya saya, Yani, Wasis, Arifin

MH: Bagaimana peranan anda dalam menghadapi pemilu 2009?

KM: Jadi gini lho, kalau untuk partai itu Majelis Zikir SBY sangat berperan, Cuma *khan* Majelis Zikir tidak mengekspos diri, tapi Majelis Zikir itu memberikan kontribusi 70 kursi dari 148, *tulis tuh*, dan kita punya buktinya itu, jadi ceritanya adalah Majelis Zikir itu *khan* terdiri dari banyak partai, pengurusnya dari Partai Golkar, dari PKB, dari PAN, tapi PAN sedikitlah, yang banyak itu dari PKB dan

PPP. Starteginya namanya operasi senyap, *silent operation* itu pengurus Majelis Zikir turun ke daerah, kemudian pertama strateginya sebelum ke daerah, dikumpulkan seluruh pengurus Majelis Zikir seluruh Indonesia di Ciburial. Saya yang *brief* sama ketua umum Majelis Dzikir.

Strateginya adalah meskipun Majelis Zikir ini tidak terlibat pada urusan partai politik tapi kalau urusan pilihan presiden, mau tidak mau harus diperjuangkan, agar ketua Dewan Pembina kita, dapat diusung untuk dicalonkan pada periode kedua sebagai presiden. Kalau Partai Demokrat sebagai corongnya tidak memenuhi syarat, maka Majelis Zikir punya kewajiban moral untuk menyiapkan *mercy* untuk pak SBY

Maka strateginya adalah masing-masing daerah pemilihan calon dari Partai Demokrat, Majelis Dzikir memilih satu orang akan didukung sebagai calon legislative DPR RI. Kami mempersilahkan kepada pengurus Majelis Zikir daerah untuk menentukan sendiri nama-namanya, kemudian nama-namanya dikirim ke pusat, dikoordinasikan antara wilayah dengan dapil dengan cabang yang ada siapa yang akan di dukung.

MH: Apakah otomatis calon legislative nomor satu?

KM: Tidak otomatis nomer satu, dalam pemilu 2009, Majelis Dzikir mendapatkan 70 nama dari 70 dapil karena satu dapil di Indonesia Timur itu *gak* ada yang beragama Islam. Akhirnya kita serahkan 70 nama itu ke SBY kurang lebih sebulan sebelum pencoblosan, "*pak, inilah apa yg dilakukan majelis zikir*", wah bagus, kami mendukung 70 caleg yang juga didukung oleh Majelis Zikir dimasing-masing dapil satu orang, apakah kami perlu pengumuman, mohon petunjuk. SBY bilang "*Jangan kalau diumumkan, yang penting caleg yang didukung itu tahu*". Apa yang terjadi setelah pencoblosan dari 76 itu 70 yang masuk ke DPR.

Sebagai contoh, cari caleg Partai Demokrat yang jadi di Jambi temannya Bu Ani, semula yang kita dukung bukan dia, yang kita dukung nomor satu, ada sms dari temannya Bu Ani itu smsnya diforward ke saya "*Pak kurdi, tolong teman saya dibantu lha*". Terus saya bilang tolong itu dialihkan dukungannya, dia menang.

Tanya Angelina sondakh, Angelina sondakh itu kalau tidak di dukung Majelis Zikir itu belum tentu jadi, karena dia bukan islam tapi dapilnya itu lho, dapil magelang. Saya ditelpon Mbah Moti itu, Wonosobo Temanggung itu "*pak kurdi ini kok majelis zikir Angelina ini agamanya apa?*" Aku bilang "*Islam mbah*" kemudian Mbah Moti mengatakan "*pokoknya kalau salah sampean yang dosa*". Saya jawab "*enggih pak, insya Allah*", jadi.

MH: Kalau NU kan jelas, Muhammadiyah kan jelas, PERSIS kan jelas, karakter majelis zikir itu seperti apa mas?

KM: jadi begini *lho*, setelah saya pelajari, kenapa majeliszikir ini kemudian militan dan kenapa dia solid? Ternyata selama periodisasi 2004-2009 terus terang itu dikalangan *nahdiyin* ada semacam kevakuman aktivitas, masuklah Majelis Zikir mengisi kevakuman itu, 80% pengurus majelis zikir cabang itu juga adalah pengurus Nahdatu Ulama, itu saya buktikan ketika mas Slamet *running* menjadi ketua umum PB NU. Jadi soliditasnya disitu, dalam bahasa jawanya menjadi aktif kembali ditambah lagi baju Zikir itu, wah menjadi kebanggaan itu. Saya *ngomongnya* apa sama kyai-kyai Majelis Zikir itu, untuk DPRD tingkat 2, tingkat 1 silahkan coblos partainya masing-masing tapi untuk pusat kali ini, saya minta tolong sekali sajalah Partai Demokrat.



TRANSKRIP TESIS

28 APRIL 2010

WAWANCARA DENGAN MARZUKI ALIE (MA) DI GEDUNG DPR RI

MH: Bagaimana aturan Partai Demokrat dalam mengambil kebijakan internal dan eksternal?

MA: kebijakan itu macam-macam, tapi pada prinsipnya kita mengikuti saja AD/ART Partai Demokrat, apakah itu rapat pengurus harian atau rapat pimpinan atau rapat pleno

MH: Apakah ketua Umum mempunyai hak veto dalam mengambil kebijakan?

MA: tidak ada sesuai AD/ART partai Demokrat

MH: Bagaimana relasi DPP partai Demokrat dengan Dewan Pembina?

MA: Hubungannya organisatoris, dewan Pembina memberikan nasehat, arahan, sebagai pendiri partai kadang kala memberikan arahan dan petunjuk, tetapi beliau itu bukan pemimpin yang otoriter, kita tahu pemikiran-pemikirannya bagus

MH: Apa kebijakan internal DPP Partai Demokrat pada awal kepengurusan periode 2005-2010?

MA: ada, yaitu konsolidasi organisasi, sesuai dengan hasil kongres, maka kita harus konsolidasi organisasi secepat-cepatnya, pada saat konsolidasi organisasi *khan* kita rekrut pengurus, kita adakan pelatihan sambil investasi politik dan komunikasi dengan partai lain

MH: Ada kebijakan kalau orang luar Partai Demokrat bisa menduduki posisi elit seperti Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal?

MA: Waktu itu dalam AD/ART Partai Demokrat, memungkinkan karena setiap orang yang punya kartu anggota bisa saja, dalam AD pasal 3 ayat 2 disebutkan untuk menjadi pimpinan harus memiliki kartu anggota. Jadi tanpa harus 1 atau 2 tahun dalam struktur partai. Kemungkinan seperti yang diatas harus di rubah.

MH: Strategi dalam membuat kebijakan eksternal dalam kemenangan pemilu 2009?

MA: Sebetulnya namanya kemenangan itu satu paket kerja besar, konsolidasi organisasi, rekrutment dan pembinaan kader juga termasuk strategi kemenangan, jadi kita bicara management juga bicara marketing, bagaimana partai itu mampu dimenej dengan baik, bagaimana partai mampu menjual produk-produk partai politik kepada masyarakat, konsep menjual itu bisa dengan program-program turun ke konstituent dalam setiap kejadian-kejadian kita dulu dalam arti pencitraan, lalu yang kedua tentu dengan promosi, keberpihakan, kinerja kita harus kita promosikan, sehingga yang namanya *air campaign*

itu *khan* mempromosikan produk Demokrat itu apa, sehingga masyarakat tahu kalau Demokrat itu partainya perempuan, Demokrat itu partainya anak muda, Demokrat itu berpihak kepada rakyat jadi semuanya itu disampaikan kepada masyarakat melalui *air campaign* itu dengan iklan itu disamping istilah orang perang darat yaitu komunikasi yang dibangun dengan masyarakat yang tidak disiarkan karena merupakan paket besar, jadi *gak* bisa sepotong-sepotong, suatu kegiatan yang dimulai dari keputusan-keputusan kongres

MH: Ada anggapan bahwa pengurus partai Demokrat itu tidak punya kebijakan?

MA: *Ada lah* dalam diskusi-diskusi, Dewan Pembina menyampaikan, kita memberi masukan. pasti ada, siapa bilang *gak* ada? kebijakan SBY *khan* disampaikan kepada kita, lalu kalau ada masukan-masukan lain kita tambahkan *khan* banyak *gak* inget semua, waktu *khan* berjalan terus, misalnya ada masalah KUR ada yang tidak jalan, misalnya KUR daerah sini itu begini-begini, kemudian langsung dresponnya dengan menteri yang bersangkutan, dengan Bank yang tidak menyalurkan, itu *khan* bagian dari pengawasan yang kita lakukan jadi banyak juga yang kita diskusikan yang bermanfaat buat Negara ini. Kebijakan Negara ya yang *ngurus* Negara, *masa iya* partai yang *ngurusin*, bahwa ada diskusi kadang-kadang ada, bukan *gak* pernah di diskusikan. Kita aja kebijakan langsung kita bicarakan dengan menteri *koq*, ketemu partai kita dengan menteri lalu kita bicara, apa itu penjualan dengan system kerjasama *join operation* pabrik gula di Jawa Timur, kita beri masukan kalau itu tidak bener dan akhirnya dibatalin. Berarti *khan* pengaruhnya ada, yang *gak* pernah ikut yah *gak* tahu, saya sebagai SEKJEN tahu, ketemu sama menteri kita minta pemaparan masalah kerjasama pabrik gula di Jawa Timur, ini melanggar Undang-undang terakhir kan dewan yang mencegatnya, akhirnya *khan* batal.

MH: Kalau itu *khan* posisi hanya sebagai pengawasan

MA: *gak* juga, sebelum kebijakan diambil, kita sudah diberi masukan, kita cegat ketua DPR yah batal. Orang luar itu *gak* tahu kinerja kita makanya istilah kita itu *silent revolution*, kita itu kerja diam, kita mengadakan pelatihan PPKPD selama 2(dua) minggu tidak ada yang tahu media di Cipanas, ada 2000an kader kita yang pelatihan saya yang mimpin langsung, saya sebagai ketua SC

MH: Itu konsepnya untuk apa?

MA: Pembinaan kader, disana kita ajarkan bagaimana kader mempunyai wawasan Nusantara, militansi terhadap partai, kader yang mampu memimpin partai, bagaimana kader mampu menjual partai sehingga menang pemilu. Ada 3 tahapan itu kita berikan arahan pelatihan. kalau ada yang bilang menang karena keberuntungan itu yah *gak apalah*, kita itu semuanya pakai konsep. Saya *khan* puluhan tahun sebagai direktur jadi jalur kerja jelas Menang itu ada ukuran, kalau ingin mencapai sekian persen berapa yang kita kerjakan.

Kami menggunakan analisa SWOT dulu, analisis kita cek bagaimana untuk 30% jadi bukan *tahu-tahu* dapet 30%, orang kaget tapi kita *gak* kaget.

MH: Sebelumnya target 15% hasil kongres, hasil rapimnas?

MA: iya, kemudian kita lihat perkembangannya, kemudian ditingkatkan menjadi 20%, sebagaimana diketahui kulit kita sudah 25%, makanya angkat ke 20%

MH: Seluruh kebijakan di analisa SWOT dan melihat dari *survey* juga?

MA: iya, Kebijakan pemerintah *khan* juga mempengaruhi, itu *khan* masalah eksternal, kalau kebijakan pemerintah sukses *khan* itu *opportunity*, untuk menjadi *opportunity* ya harus dipromosikan beberapa program melalui *campaign*, itu semua melalui analisis, *gak* ada semuanya ngandelin langit, saya ini semua kerja dengan konsep

MH: Selama ini ada anggapan dominan apakah DPP Partai Demokrat ikut bekerja dalam memenangkan pemilu 2009?

MA: Kalau tidak ada struktur dari pusat sampai kebawah, bagaimana bisa menang? Struktur dibawah itu perpanjangan dari DPP, kalau semua bilang karena *icon* saja tidak *usah* ada struktur partai, apakah akan menang? Pasti enggak menang, jadi itu pembodohan, semuanya berkontribusi, partai berkontribusi, nama besar SBY berkontribusi, kalau tidak ada nama besar SBY mungkin tidak samapi 20%, mungkin dibawah itu,

Sebagai kekuatan partai Demokrat, partai ini sudah terbangun sampai kecamatan bahkan anak ranting, jangan bilang tidak ada kinerja partai, kalau dibidang tidak kinerja partai bagaimana membangun konsolidasi organisasi sampai ke ranting, bagaimana kita *bakti social* ke ranting-ranting? Yang penting apa yang kita kerjakan, tujuannya menang.

MH: Bagaimana untuk memenej konflik dalam Partai?

MA: Setiap partai itu pasti ada konflik, yang terpenting menyadari konflik itu untuk apa? konflik itu ada karena perbedaan pendapat, perbedaan pendapat dalam demokrasi sebuah keniscayaan, namun apabila didiskusikan dan dipertemukan menjadi biasa-biasa aja. konflik itu bukan memecah belah partai, konflik itu karena ada perbedaan pendapat

MH: Dalam pemilihan legislative itu ada nomor urut, walaupun MK sudah memutuskan suara terbanyak tetapi nomor satu angka *psikologis*.

MA: Buktinya Ibas nomor 3, anaknya ketua umum nomor terakhir nomer 6. karena masyarakat sudah menilai, mereka bilang orang yang mendapatkan nomor satu itu pasti orang terjaga dan giat bekerja. Jangan salah nomor satu karena jabatan terus dia tidak bekerja *yah gak* kepilih juga, maka bagaimana dia membangun konstituen.

Orang yang mendapatkan nomor satu itu lebih dipercaya, punya kinerja itu sudah pasti. Harus diingat, Jangan salah orang yang nomor satu tidak bekerja tidak jadi juga. Untuk penomoran urutan dalam pencalegan di legislative itu berdasarkan criteria seperti jabatannya jabatan partai apa, masa Sekjen nomor urutnya sepatu, kan aneh

MH: Syarat-syarat apa dari DPP Partai Demokrat?

MA: Pastinya ada kriteria, orang *tau-tau* datang menjadi nomor satu, tidak mungkin, itu dilihat dari kinerjanya, jabatannya di partai apa? jadi semuanya ada criteria. jadi *gak mentang-mentang* karena banyak duit ditaruh nomor satu.

MH: Ada *gak* yang memakai duit?

MA: *ya gak ada lha di kita dibatalin*

MH: DPP Partai Demokrat dalam pencalonan pemilihan legislative 2009, apakah ada prasyarat utama tak tertulis itu karena faktor uang, keluarga, kedekatan dll?

MA: Enggak ada, uangpun urusan pribadi masing-masing, kalau mau menang *yah* punya uang untuk kampanye. DPP paling hanya bisa kasih atribut, selebihnya yang bersangkutan

MH: Pelatihan kepemimpinan PPKPD itu berapa kali bang?

MA: 8 angkatan terdiri dari ketua DPC, Sekretaris DPC, Ketua pemberdayaan perempuan. Pada tingkat DPC melaksanakan juga, jadi ada turunannya, jadi di daerah mereka melaksanakan juga

MH: Bagaimana ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono?

MA: Partai-partai yang tidak ada tokoh, *yah* segitu-gitu aja. Kalau partai Keadilan Sejahtera tidak ada tokoh hanya sampai menjadi Partai Menengah saja. Waktu awal, partai kita *gak* ada tokoh tapi terus melakukan konsolidasi, organisasi berkembang, keanggotaan nambah pasti naik *lha*, kaderisasi jalan cuma tidak bikin besar, peran tokoh paling tinggi cuma 10% Partai-partai yang tidak ada tokoh suaranya hanya segitu-gitu aja. Kita buktikan paling tinggi 10 persen partai tanpa tokoh. PKB menjadi lebih besar karena adanya Gus Dur, tetapi setelah tidak ada menjadi turun. karena masyarakat Indonesia belum masuk sebagai pemilih rasional, Untuk menciptakan pemilih rasional dibutuhkan 20 tahun lagi, lihat masyarakat Indonesia, pendidikan seperti apa? Pendapatannya seperti apa? 70 persen masih SMP lihat hasil BPS, dimana rasionalnya? Sebagian besar perutnya laper, Siapa yang memberikan beras, dia yang milih.

Sedangkan Partai Golkar strukturnya kuat, sampai ke Camat pasti Golkar, kalau tidak punya tokoh lama-lama Partai Golkar akan turun, kita buktikan karena jaringan itu akan tergerogoti

MH: Kalau Partai Demokrat *khan* dengan menjual kebijakan pemerintah seperti memberikan BLT?

MA: ya, pemerintahnya yang kita jual, ada faktor eksternal opportunity, bagaimana *opportunity* kita manfaatkan, dalam agama sembako tidak diumumkan, dalam politik tidak ada *riya* (memamerkan) yang ada *riya* itu pribadi, yang *sodaqah* bukan orang tapi partai, partainya tidak jelas,tidak ada partai masuk sorga, he



Hasil wawancara dengan pendiri Partai Demokrat Sutan Bhatoeena

Minggu 28 Maret 2010 di rumahnya di Gunung Putri Bogor

MH: Bagaimana awal mula berdirinya Partai Demokrat

SB: menurut saya, awal mula berdirinya partai Demokrat kita ingin melihat figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemimpin bangsa yang bisa membawa Negara lepas dari keterpurukan karena sejak jatuhnya pak Harto dipimpin Habibie gonjang-ganjing dan tidak stabil, Gus Dur demo dimana-mana tidak karu-karuan, mbak mega tidak ada perkembangan karena saya sebelum masuk partai bergerak di dunia bisnis terpuruk semua, pening kepala kita. Setelah ketemu pa SBY, teman saya Pak Vence Rumengkang, mencalonkan calon presiden waktu itu, saya bilang ini calon pemimpin masa depan kita dukung, ikutlah kita mendukung beliau, tetapi tidak terpilih. Akhirnya masuk menjadi menko polkam di era mbak mega, dari sanalah kita menjalin hubungan, pada saat itu saya bilang, sudah saatnya kita membuat partai untuk SBY, ternyata ada respon dari SBY dan SBY bilang saya juga terpikir, kalau bisa suatu saat partai ini jangan terlalu banyak, seperti di Amerika. Republic dan Demokrat. Nah disinilah kita buat partai Demokrat, pak SBY kasih filosofi dari partai ini partai yang terbuka.

MH: Kenapa nama partai Demokrat?

SB: Beliau itu menyatakan kepada kita bahwa kita mengidam-idamkan suatu Negara yang demokratis yang dipimpin orang-orang yang Demokrat, Demokrat adalah orang yang mementingkan orang banyak daripada kelompok maupun diri sendiri, itu Demokrat nah kita butuh itu. Nah SBY ingin itu, dan kita wajar. Akhirnya karena beliau itu mengatakan tentang Demokrat, visi misi, logo, arti logo, bendera kita modifikasi dari dia bikin. Jadilah bendera itu SBY langsung (**untuk memperjelas akan ada buku sejarah tentang partai Demokrat**)

MH: Konsep dasar dan platform partai dari TIM KRISNA BAMBU APUS?

SB: Krisna Bambu Apus itu adalah kawan-kawannya SBY dan Vence ada 9 (Sembilan) orang, termasuk Adyaksa Daud, Sirote Syafei, Tonti Suko Sudarso. Teman-teman ini yang merumuskan pikiran SBY tapi belum dalam bentuk partai. Setelah itu pertemuan lagi, saya *khan* waktu itu belum masuk

MH: abang itu masuk tahun 2001?

SB: betul, saya itu dipanggil pak Vence, ketika pak Vence ada pertemuan selanjutnya dengan SBY dan beberapa teman-teman melaporkan ke pak SBY bahwa ini partai harus segera dibentuk, pak Suko bilang 2 tahun lagi dan yang lain bilang terlalu cepat karena ini *khan* tahun 2001, jadi ketika pak Vence ditanya bagaimana? Beliau jawab besok saya bentuk, kenapa begitu? Karena saya ini bisnis, kalau terlalu lama nanti *cost*-nya terlalu tinggi, biar saya laporkan ke bapak kalau udah saya bentuk, lalu setelah itu dia kontak saya karena saya *khan* punya *grass root*, saya punya *massa*, pak Vence punya duit lalu jalan *lha* kami dan inilah hasilnya.

MH: dalam criteria ketum dan sekjen, dibuat ketum harus orang Jawa dan beragama Islam, sekjen diluar Jawa dan beragama kristen?

SB: idealnya begitu, setelah dilepaskan oleh SBY, SBY *khan* bilang gak ikut-ikutan lagi buat partai karena dia *khan* udah MENKOPOLKAM, kita sama-sama berjuang, biar nanti ketemunya dimana, bentuk saja partai ini, jual dia tidak ada masalah tapi jangan melibatkan dia, karena itu *gak* bagus dalam bertatanegara ikut itu *khan* di pemerintahan, udah setelah itu kita sendiri yang jalan, dialog dengan kita, kami ketemu dengan pak Budi Santosa, prof Budi kita lobi dia, karena dia *khan* salah satu pendiri, setelah berdiri ada 99 orang dan sekarang ketuanya siapa, kita tunjuk si A si B dari 99 orang itu *gak* ada yang mau, pak Budi tidak mau, akhirnya kita bilang pak Budi duduk enak saja biar kami yang kerja, kita cari Sekjennya, prof Irzan Tandjung, orang Sumatera dan minoritas Kristen, Bendaharanya pak Vence.

Setahun kita bentuk partai, setelah 1 tahun, tahun 2002 dibulan Oktober, saya jadi ketua panitia deklarasi itu, *nah* waktu itu kita harapkan pak SBY bisa hadir, ternyata pak SBY tidak datang Karena pas waktu itu di istana membahas adanya bom Bali, teroris, lalu kita berjalan sendiri aja. Banyak yang kecewa waktu itu mengatakan bahwa saya dan pak Vence jual-jual nama pak SBY, tapi *Alhamdulillah* tahun 2003, bulan Mei kalau *gak* salah, kita bikin kayak pertemuan nasional di hotel MIRA, RAPIMNAS itu, waktu di Bogor pak SBY datang, itulah awal kejayaan kami, kita foto SBY satu-satu agar bisa mereka bawa ke daerah-daerah.

MH: ini kenapa banyak yang profesor ya bang?

SB: begini kalau kita ambil orang politik , nanti malah dikira kita yang ngerjain, kita cari orang-orang yang jujur, orang jujur ini adalah orang-orang akademik, akhirnya sekarang kita ditinggal orang lama, tadinya *khan* kita bentuk partai berangkat dari keinginan untuk membuat pak SBY jadi presiden. Akhirnya kawan-kawan yang berjuang ini karena dia orang politik, coba kalau semuanya politik, bisa-bisa *awak* kita malah dikerjain, itu yang terjadi, kita mau masakan dan orang-orang kampus gitu *lho*, waktu itu yang mau masuk Bambang W Suharto, malah kita jadi resitensi memunculkan partai ini, orang *khan* ngomong wah luar bisa partai ini tapi ini tepat. Partai demokrat *lha*

MH: satu sisi diluar abang mengadakan rapat dengan pak Vence dll tapi satu sisi MENEGPOLKAM juga melaksanakan diskusi-diskusi dalam rangka mematangkan partai, maksud saya apakah posisi dalam hal ini MENKOPOLKAM itu sudah mengarahkan untuk pembuatan partai bahkan dipimpin langsung oleh SBY,?

SB: Yani itu salah satu aktivis binaan pak SBY, orang dia itu aktivis yang ditangkep yang dibina oleh Hendro Priyono yang dipenjara *khan*, Yani Wahid itu sekarang sudah *almarhum*, jadi SBY tidak ada rapat-rapat bikin partai itu tidak ada

MH: simulasi-simulasi untuk diskusi itu *khan* ada bang?

SB: itu dengan pak Vence dan kawan-kawan itu tadi, bukan tersendiri.

MH: tapi kalau seandainya lihat di website Demokrat, MENKOPOLKAM itu mengadakan diskusi secara sendiri, kadang dipimpin oleh SBY langsung kadang oleh Ahmad Yani, yang kedua saya pernah ketemu pak Jimly Assidiqy bang, beliau pernah ditawarkan untuk menjadi salah satu pimpinan?

SB: iya ditawarkan pak Vence, kita *khan* sibuk mencari ketum, *boro-boro* dari luar dari dalam aja *gak* ada yang mau, tau *gak* setelah pak Budi jadi ketum itu sementara, *khan* dia *gak* mau, pak Vence masih mencari figure yang cocok

MH: kenapa ga pak Vence langsung?

SB: Kristen *khan*, kita pengennya yang muslim, kita kemasannya harus bagus, kita ini mau menjual partai, memang sudah ada pak SBY tapi ketua partainya siapa?

MH: berarti SBY pasif ya bang dalam hal ini?

SB: iya pasif, dia hanya menyerahkan ke kita, bangkitnya dia masuk ke kita itu setelah rapimnas tahun 2003, dari situ mulai bangkitlah kami dengan adanya dia, dia tetap ada di dalam ke kita, tahun 2004 dia keluar, jadi kamu bilang pasif itu betul, dia bilang "biar saya bekerja, kalian di partai, nanti kita ketemu" yah akhirnya ketemu nya yah 2004, kita memang betul-betul hati-hati saat itu, memunculkan dia itu memang harus *silent operation*, kalau *gak* segera pasti dikomentarin oleh orang banyak, *khan* tinggal kita sampaikan ke pak SBY, partai ini harus bisa membawa dia nanti, sebagian orang-orang pak SBY malah tidak setuju dengan partai ini, lalu ditegur oleh dia

MH: siapa orangnya bang?

SB: Sudarso mengatakan terlalu besar nama SBY masuk ke dalam Demokrat, malah saya bilang, kita *khan* *gak* boleh pake nama besar SBY, malah saya bilang “*SBY yang melahirkan partai ini, jangan jadi anak haram*” maka jadilah partai ini, orang yang dulu *ngelarang* malah bilang dulu kita ini disini, mana itu, saya mengatakan faktanya, banyak orang disekitar pak SBY yang tidak setuju, mereka bilang ini partai kecil *gak* bakal jadi, ternyata jadi

MH: ada faktor lain ga bang yang membuat partai ini menjadi partai yang besar?

SB: pak SBY *khan* turun langsung, pada saat itu *khan* pak SBY diidentikan sebagai orang yang teraniaya, disamping itu juga pak SBY sedang diidolakan orang juga, pooling juga besar waktu beliau nyalon wapres itu *khan*

MH: ada peranan militer

SB: *gak* ada, malah kita dikucilkan kalau anda mau tahu

MH: di Papua yang ga kenal TV dan segala macam ternyata memilih Demokrat, saya beranggapan bahwa ada silent operation?

SB: enggak ada sama sekali, malah kita dikucilkan, yang saya ketahui dari pak SBY, KASAD waktu itu, *memblock* kita dimana-mana, bahkan kita ditegur oleh AD bahwa kita menyatakan anti militer, menghindari ketemu pak Ryamizard Riyacudu bukan untuk ketemu, hanya untuk mengklarifikasi

MH: caleg-caleg itu mantan militer?

SB: kalau masalah caleg, orang lain semua, orang kita semua cari orang *koq*, saya katakan ketika pak Budi hanya mau sementara, kita cari tokoh-tokoh yang berbau islam, pak Vence ini Kristen, sempet ada yang bilang bahwa partai ini partai orang Barat yang ingin mengkristenkan Indonesia, bahaya ini *khan*, akhirnya saya dengan pak Vence mencari orang yang berbau islam, jadi ketua kita, kasih tugas *lha* saya, saya sendiri datang ke profesor Dadang Hawari, terus dia bilang, saya suka dengan SBY tapi saya tidak mungkin masuk partai karena saya ini wakil presiden dunia untuk para psikologi, ditolaknya kita. Lalu Said Agil Siradj, saya hubungi juga tapi dia nolak, dan Mubarak tidak masuk dalam kategori. Kemudian tokoh nasional, Ihsanul Amal yang mantan rektor UGM, juga nolak karena dia PNS, terakhir saya bilang ada Pak, Martiono, bekas direktur pertamina, pak Martiono bilang adakan kongres dulu ke SBY, *nah* untuk *ngelakuin* itu berat kita, karena SBY *khan* *gak* mau terlibat itu *khan*, dia tau bersih *toh*, terakhir kita pening kita ambil AD sajalah, kemudian menghubungi pak Wisnoyo Arismunandar, Wisnoyo bilang saya *gak* ikut-ikutan partai dulu *lha*, tapi saya dukung pak SBY, jadi *gak* ada yang mau lalu kembali lagi ke pak Budi, sampai kongres juga tidak diganti, itulah perjalanan kita, itu ketua *lho* yang kita tawarkan tapi *gak* ada yang mau, itu ketum *lho* apalagi caleg-caleg, nyerah kebanyakan, kita terbuka sama sampai saja,

MH: saya masih ngotot ni bang, ada si A, ada sekoci,

SB: itu *khan* menjelang pemilu jadi dia *gak* ikut-ikutan, itu ide dari pak SBY dan pak SBY itu dapet dari AD, dimana menguasai territorial, makanya dia bikin itu, bukan partai itu, timses namanya

MH: itu strategi pemilu legislative ya bang?

SB: dilegislatif *gak* ada dia, itu hanya untuk pilpres saja





